



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT JENDERAL 2023



KATA SAMBUTAN



Segala Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan anugerah-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dapat tersusun dan diselesaikan tepat waktu, sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dipercayakan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas kinerja dan penggunaan anggaran Tahun 2023.

Laporan Kinerja disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yang sesuai dalam penggunaan anggaran Tahun 2023. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat Jenderal. Permasalahan yang dihadapi akan menjadi bahan masukan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut serta langkah perbaikan ke depan yang terprogram dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Ungkapan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya hingga terselesaikannya laporan kinerja ini dan tercapainya kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023. Semoga Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi guna peningkatan kualitas kinerja Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi demi mewujudkan sinergi yang semakin PASTI dan BerAKHLAK untuk kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang berdampak.

Sekretaris Jenderal,



Komjen Pol (P) Dr. (H.C.). Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka menghasilkan laporan kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, telah ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud kinerja Sekretariat Jenderal untuk membantu pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dijabarkan dalam RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Untuk mewujudkan Sasaran Program Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan target yang telah ditetapkan, ada beberapa Indikator Kinerja untuk pencapaiannya. Diharapkan dengan penetapan Indikator Kinerja tersebut, Sasaran Program dapat terlaksana dengan baik, terarah dan terencana sehingga dapat mewujudkan sinergi yang semakin PASTI dan BerAKHLAK untuk kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang berdampak.

Sasaran Strategis Ke-8 yaitu Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien, dapat tercapai dengan dukungan Program Dukungan Manajemen yang dijalankan oleh Unit Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal melaksanakan 2 (dua) Sasaran Program dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Program dan tercantum dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 dengan capaian sebagai berikut :

Sasaran Program	No.	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian	Status
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1.	Presentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	94%	100%	106,38%	Sangat Baik
	2.	Presentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94%	93,18%	99,13%	Baik

Sasaran Program	No.	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian	Status
Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	3.	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP	WTP	100%	Baik

Penjelasan :

- Indikator Kinerja Program Ke-1, Presentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal “BB” dengan target 94%. Inspektorat Jenderal melakukan panel evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum dan HAM terhadap 11 (sebelas) Unit Eselon I. Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Nomor ITJ-PW.03.01-159 tanggal 30 Mei 2023 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan pada 11 Unit Eselon I dan 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk dengan hasil sebagai berikut:

- 1 Kantor Wilayah mendapatkan nilai “AA”
- 9 Unit Eselon I dan 32 Kantor Wilayah mendapatkan nilai “A”
- 2 Unit Eselon I mendapatkan nilai “BB”

Sehingga Indikator Kinerja Program Ke-1, terealisasi sebesar **100%** dengan capaian **106,38%**

- Indikator Kinerja Program Ke-2, Presentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90 dengan target 94%. Berdasarkan hasil capaian Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 11 Unit Eselon I dan 30 Kantor Wilayah mendapatkan nilai minimal 90
- 3 Kantor Wilayah mendapatkan nilai di bawah 90

Sehingga Indikator Kinerja Program Ke-2, terealisasi sebesar **93,18%** dengan capaian **99,13%**.

- Indikator Kinerja Program Ke-3, Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM dengan target WTP. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 Nomor: 30.a/LHP/XV/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atau *unqualified opinion*. Sehingga Indikator Kinerja Program Ke-3, terealisasi **WTP** dengan capaian **100%**.

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 dibiayai dari dana APBN sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SP DIPA-013.01.1.404233/2023 tanggal 30 November 2022 semula sebesar Rp. 4.861.070.505.000,- telah mengalami 23 kali revisi DIPA sehingga menjadi **Rp. 4.755.936.194.000,-**. Berdasarkan data OM-SPAN realisasi anggaran pada Tahun 2023 adalah **Rp. 4.518.893.442.720** atau **95,02%** dari total pagu dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian
Belanja Pegawai	3.909.310.715.000	3.698.778.550.622	210.532.164.378	94,61%
Belanja Barang	680.136.936.000	655.667.965.429	24.468.970.571	96,40%
Belanja Modal	166.488.543.000	164.446.926.669	2.041.616.331	98,77%
Total	4.755.936.194.000	4.518.893.442.720	237.042.751.280	95,02%

Penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal yang cukup optimal ini menjadi penentu tercapainya Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Lainnya Kementerian Hukum dan HAM yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2023.

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:
 - 1) Sekretariat Jenderal sebagai Satuan Kerja adalah **88,98**
 - 2) Sekretariat Jenderal sebagai Eselon I adalah **97,33**
- b. Nilai IKPA Sekretariat Jenderal adalah **95,36**

Tercapainya Sasaran Program Sekretariat Jenderal tidak terlepas dari dukungan pelaksanaan Sasaran Kegiatan yang dilakukan oleh 6 (enam) Biro yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Tahun 2023 dengan capaian sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Status	Keterangan
Terwujudnya Organisasi Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang Efektif dan Efisien	Presentase Satuan Kerja yang Mengimplementasi kan 8 Area Perubahan	95%	99,20%	104,42%	Sangat Baik	Biro Perencanaan
Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	Presentase Satuan Kerja yang Mendapatkan Nilai SMART di atas 95	100%	56,37%	56,46%	Kurang	
Peningkatan Kualitas Pengelolaan	Persentase Pegawai yang memperoleh hak-	95%	110,74%	116,57%	Sangat Baik	Biro Sumber Daya Manusia

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Status	Keterangan
Sumber Daya Manusia	hak yang terdapat didalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement					
Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Efektif dan Efisien	Persentase Satuan Kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93	100%	93,87%	93,87%	Baik	Biro Keuangan
Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung Tusi sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%	99,95%	99,95%	Baik	Biro Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/Jasa
	2. Persentase menurunnya Nilai Temuan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	10%	0%	200%	Sangat Baik	
Meningkatnya Citra Positif Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Opini Positif terhadap Pemberitaan Kementerian Hukum dan HAM di Media	90%	100%	111,11%	Sangat Baik	Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Pegawai yang Puas atas Layanan Umum Internal Kesekjenan	95%	100%	105,26%	Sangat Baik	Biro Umum

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	10
D. ASPEK STRATEGIS	10
E. ISU STRATEGIS	11
F. SISTEMATIKA PENULISAN	12
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 13
A. RENCANA STRATEGIS	13
B. PERJANJIAN KINERJA	29
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 33
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	33
B. REALISASI ANGGARAN	53
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	54
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	55
E. EFISIENSI SUMBER DAYA	70
 BAB IV PENUTUP	 75
A. KESIMPULAN	75
B. SARAN	75
 LAMPIRAN	 77



DAFTAR TABEL

2.1	Kebijakan Strategis Sekretariat Jenderal pada Masa Pandemi Covid-19	25
2.2	Kebijakan dan Strategis Reformasi Birokrasi	27
2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sekretaris Jenderal	30
2.4	Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Jenderal 2023	31
3.1	Klasifikasi Capaian	33
3.2	Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023	34
3.3	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-1	34
3.4	Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	35
3.5	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2023 dengan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2022	37
3.6	Perbandingan Capaian Nilai AKIP Tahun 2023 dengan Tahun 2022	37
3.7	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	39
3.8	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-2	41
3.9	Informasi Praktik Baik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	42
3.10	Hasil Capaian Rencana Kerja Tahunan Revormasi Birokrasi Tahun 2023	43
3.11	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-2 Tahun 2023 dengan Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2022	45
3.12	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-2 Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	46
3.13	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-3	48
3.14	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-3 Tahun 2023 dengan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2022	50
3.15	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	50
3.16	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-3 Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	51
3.17	Anggaran dan Realisasi Sekretariat Jenderal Tahun 2023	53
3.18	Anggaran dan Realisasi Per Jenis Kegiatan Tahun 2023	53
3.19	Perbandingan Pagu dan Realisasi Sekretariat Jenderal Tahun 2023 dan 2022	53
3.20	Nilai SMART Sekretariat Jenderal sebagai Satuan Kerja Tahun 2023	54
3.21	Nilai SMART Sekretariat Jenderal sebagai Eselon I Tahun 2023	54
3.22	Capaian Target Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023	57
3.23	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 Biro Perencanaan Tahun 2023	59
3.24	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 Biro Perencanaan Tahun 2023	59
3.25	Capaian Nilai SMART Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023	60
3.26	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Biro Sumber Daya Manusia Tahun 2023	61
3.27	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Biro Keuangan Tahun 2023	63
3.28	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023	63
3.29	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023	66
3.30	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Tahun 2023	67
3.31	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Biro Umum Tahun 2023	68

DAFTAR GAMBAR

1.1	Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal	3
1.2	Struktur Pejabat Sekretariat Jenderal	3
1.3	Info Grafis Pegawai Sekretariat Jenderal	10
2.1	Alur <i>Cascading</i> Sasaran Strategi, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Sekretariat Jenderal	18
2.2	Alur Pohon Kinerja Sekretariat Jenderal	19
2.3	Kebijakan Reformasi Birokrasi	27
3.1	Nilai IKPA Sekretariat Jenderal Tahun 2023	55
3.2	Capaian <i>e-performance</i> Sekretariat Jenderal Tahun 2023	56
3.3	Capaian <i>e-Monev</i> Sekretariat Jenderal Tahun 2023	58
3.4	Hasil Survei Kualitas Layanan Internal Kesekjenan Biro Umum Tahun 2023	69

BAB I PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal atas penggunaan anggaran sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka menghasilkan laporan kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, telah ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Laporan Kinerja ini disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yang sesuai dalam penggunaan anggaran tahun 2023. Sekretariat Jenderal harus selalu memastikan penerapan aspek – aspek perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), dilaksanakan sesuai dengan Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM “PASTI” (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) dan *core value* ASN “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

Sekretariat Jenderal sebagai *supporting* unit memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sekretariat Jenderal menjadi motor penggerak terwujudnya visi dan misi Kementerian melalui manajemen internal yang terintegrasi, sarana dan prasarana yang memadai, pengelolaan anggaran yang akuntabel, sistem perencanaan yang SMART, manajemen kepegawaian yang profesional dan terpercaya, pembinaan hukum dan advokasi yang optimal, penyusunan bahan kebijakan yang andal dan optimal, informasi publik yang terdepan dan transparan melalui fungsi kehumasan, tata kelola administrasi perkantoran

yang efektif dan efisien. Seluruh fungsi tersebut dijalankan oleh Sekretariat Jenderal untuk menciptakan sistem kinerja Kementerian yang semakin PASTI dan BerAKHLAK.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

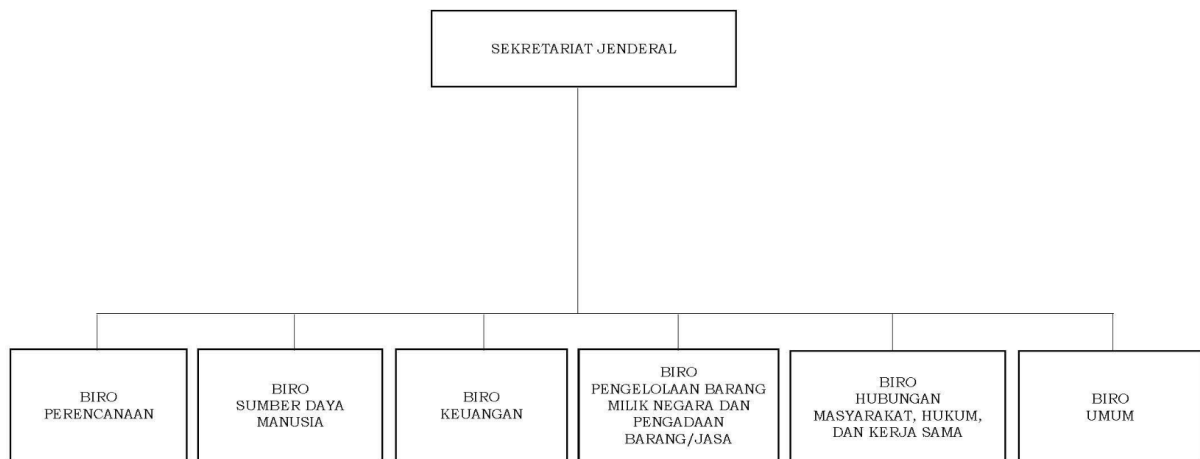
Sebagai unit yang berperan dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unit di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas : Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

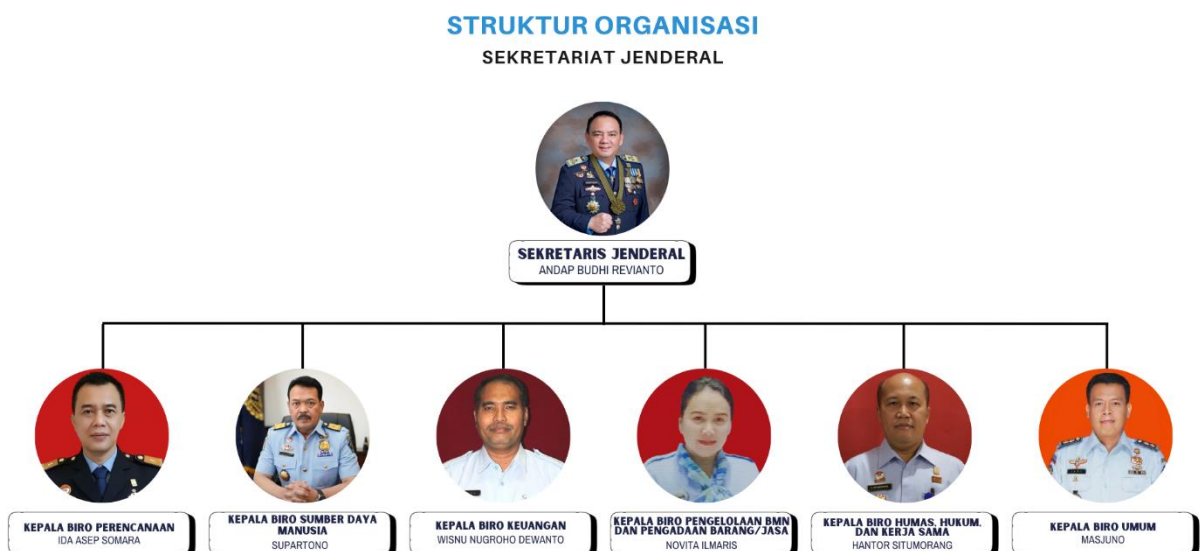
Fungsi :

1. koordinasi kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan Peraturan Menteri dan pelaksanaan advokasi hukum;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang / jasa; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal terdiri dari 6 (enam) Biro, dengan penjelasan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal



Gambar 1.2 Struktur Pejabat Sekretariat Jenderal

ESELON II UNIT SEKRETARIAT JENDERAL

Biro Perencanaan

Tugas:

Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan kinerja organisasi dan resiko, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi serta penyusunan evaluasi dan pengendali laporan kementerian.

Fungsi:

- penyusunan rencana dan program Biro Perencanaan;
- koordinasi dan pengolahan data perencanaan dan anggaran Kementerian Hukum

- dan Hak Asasi Manusia;
- c. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana tahunan;
 - d. penyusunan program dan nota keuangan/rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, perubahan/revisi rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;
 - e. pemberian bimbingan teknis perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - f. pembinaan, penyusunan, penataan, bimbingan teknis evaluasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - g. pembinaan, penyusunan, penataan, bimbingan teknis, dan evaluasi organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - h. pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - i. penyusunan dan evaluasi serta pengendali laporan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - j. pemantauan, penghimpunan, penelaahan, pengevaluasian, penyiapan pengendalian dan saran tindak lanjut serta penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program, capaian kinerja rencana kerja.
 - k. pembinaan dan penyusunan sistem manajemen kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - l. pelaksanaan penyusunan sistem pengendalian intern dan resiko di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - m. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - n. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Perencanaan.

Biro Sumber Daya Manusia

Tugas:

Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program Biro Sumber Daya Manusia;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan, penyusunan formasi, pelaksanaan pengadaan dan penempatan aparatur sipil negara;
- c. koordinasi, pengembangan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi aparatur sipil negara;

- d. pengelolaan data dan arsip aparatur sipil negara;
- e. perumusan kebijakan di bidang manajemen aparatur sipil negara, manajemen karier, manajemen talenta dan jabatan fungsional;
- f. penyusunan rencana dan evaluasi pengembangan kompetensi, fasilitasi peningkatan kompetensi, penentuan peserta pengembangan kompetensi, perencanaan penilaian kompetensi;
- g. pembinaan, penyusunan, penataan, dan bimbingan teknis serta evaluasi analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, dan kelas jabatan;
- h. penyusunan, fasilitasi, evaluasi rencana pengembangan karir, penyusunan pola karir, pelaksanaan manajemen talenta dan penugasan aparatur sipil Negara;
- i. pembinaan, pengelolaan, penetapan kebutuhan, rencana pengembangan, dan pengadministrasian jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- j. pembinaan, pengelolaan pengangkatan, mutasi, promosi, kepangkatan, demosi, pemberhentian dan pensiun aparatur sipil negara serta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi;
- k. pelaksanaan seleksi penyesuaian ijazah dan ujian dinas;
- l. perencanaan dan pengelolaan gaji berkala serta biaya mutasi dan pemulangan pensiun;
- m. pembinaan, pengendalian dan penyelenggaraan manajemen kinerja aparatur sipil negara;
- n. penyelenggaraan pengendalian dan penegakan disiplin, penyelesaian kasus kepegawaian, kode etik serta kode perilaku aparatur sipil negara, penyelenggaraan pemberian penghargaan aparatur sipil negara;
- o. pengelolaan kesejahteraan, jaminan sosial, jaminan hari tua, dan perlindungan bagi aparatur sipil negara;
- p. pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan perceraian, cuti, tugas belajar dan dinas luar negeri bagi aparatur sipil negara;
- q. pelaksanaan hukuman disiplin dan pembinaan sikap mental pegawai.
- r. penyiapan pelaksanaan budaya kerja dan citra institusi;
- s. penyusunan bahan evaluasi, monitoring dan pelaporan di lingkungan Biro Sumber Daya Manusia; dan
- t. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Sumber Daya Manusia

Biro Keuangan

Tugas:

Melaksanakan pembinaan, pengelolaan, koordinasi, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program Biro Keuangan;
- b. penyiapan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. koordinasi, pembinaan, pengelolaan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. penyusunan dan perumusan pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. penyusunan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. koordinasi dan pembinaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- g. pelaksanaan pengeluaran keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- h. pelaksanaan pembinaan dan penatausahaan pengelolaan rekening dan penerimaan hibah di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- i. pelaksanaan dan pengujian surat permintaan pembayaran dan penerbitan surat perintah membayar Sekretariat Jenderal;
- j. pelaksanaan urusan perbendaharaan di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- k. pelaksanaan penatausahaan administrasi keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- l. konsolidasi dan penyusunan laporan keuangan tingkat Sekretariat Jenderal sebagai satuan kerja, Sekretariat Jenderal sebagai eselon I, dan tingkat kementerian;
- m. pelaksanaan pembinaan dan monitoring serta evaluasi akuntansi dan pelaporan sesuai standar akuntansi pemerintahan;
- n. pelaksanaan pengelolaan dan analisa data laporan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- o. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- p. pelaksanaan pendampingan prarekonsiliasi data laporan keuangan tingkat kantor wilayah;
- q. pelaksanaan rekonsiliasi nasional data laporan keuangan tingkat pusat dan kantor wilayah;

- r. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- s. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan keuangan;
- t. pelaksanaan penyelesaian kerugian negara;
- u. koordinasi dan pelaksanaan penyelesaian kerugian negara dan tuntutan ganti rugi, pengelola keuangan/pejabat perbendaharaan negara, pengelolaan rekening satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- v. koordinasi dan pembinaan urusan perbendaharaan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- w. pelaksanaan penyusunan evaluasi, monitoring, dan pelaporan di Biro Keuangan; dan
- x. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Keuangan

Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa

Tugas:

Melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan dukungan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. pengaturan dan pembinaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. fasilitasi dan koordinasi pembinaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. pembinaan informasi dan dokumentasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. pembinaan penatausahaan dan penyusunan laporan barang milik negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- g. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara dan pengembangan kerja sama penyediaan/pemenuhan barang milik negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- h. pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan, dan penertiban barang milik negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- i. pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- j. penyusunan laporan pengawasan dan pengendalian barang milik negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- k. pelaksanaan inventarisasi, koordinasi, penyiapan bahan, analisis, telaahan, konsolidasi dan penyusunan laporan serta monitoring tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan di bidang pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- l. pelaksanaan tugas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- m. pembinaan dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa;
- n. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- o. pengelolaan jabatan fungsional bidang pengelola pengadaan barang/jasa;
- p. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- q. pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
- r. pengembangan sistem dan pengolahan data pengadaan barang/jasa;
- s. pengembangan dan pembinaan penerapan sistem informasi barang/jasa;
- t. pengembangan dan pengelolaan katalog elektronik sektoral;
- u. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
- v. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa.

Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama

Tugas:

Melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan hubungan masyarakat, advokasi hukum, serta kerja sama dalam negeri dan luar negeri di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama;
- b. pembinaan kehumasan, pengolahan dan penyebaran berita, pengelolaan dan penanganan informasi serta pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan;
- c. pengelolaan opini publik, relasi media, produksi informasi dan edukasi publik;
- d. pembinaan dan pelaksanaan pembinaan advokasi hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pendidikan khusus profesi advokat dan mediasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan administrasi, pemantauan dan evaluasi, dan koordinasi kerja sama dalam dan luar negeri;
- g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi hubungan kelembagaan;

- h. pelaksanaan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
- i. pelaksanaan penyusunan evaluasi, monitoring dan pelaporan di lingkungan Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama.

Biro Umum

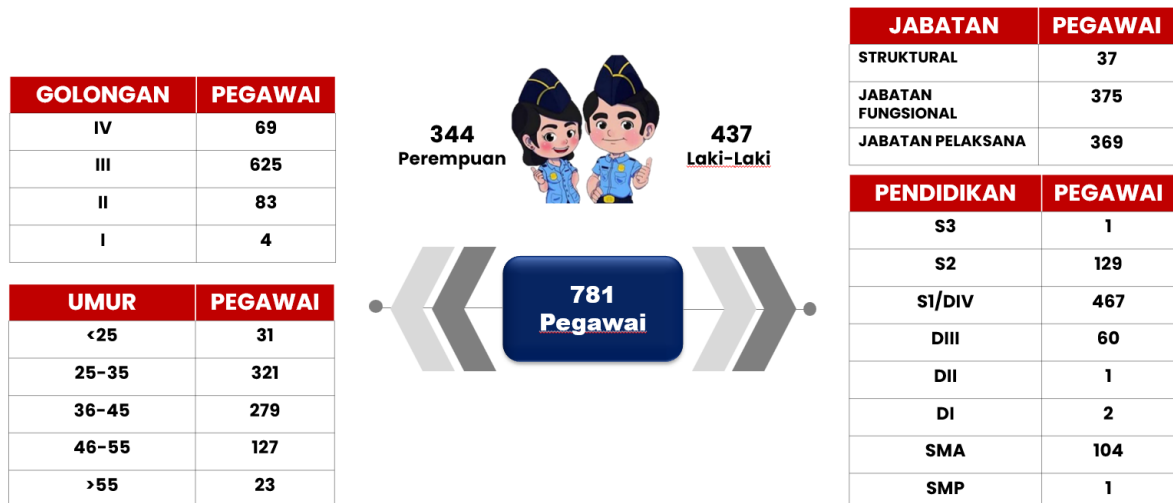
Tugas:

Melaksanakan pembinaan dan layanan ketatausahaan, kesehatan, kerumahtanggaan, prasarana fisik, keprotokolan dan pengamanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program Biro Umum;
- b. pembinaan dan layanan ketatausahaan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tata usaha Biro Umum;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan;
- d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Sekretariat Jenderal;
- e. pembinaan dan pelaksanaan urusan keprotokolan dan pengamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan layanan kearsipan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- g. pelaksanaan layanan kesehatan pegawai.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit Sekretariat Jenderal pada Tahun 2023 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak **781** pegawai dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Sekretariat Jenderal

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKjIP Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP serta untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Adapun tujuan LKjIP Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu Tahun 2023 secara jelas, transparan, dan akuntabel;
3. Sebagai Bahan Evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada tahun yang akan datang.

D. ASPEK STRATEGIS

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM merupakan salah satu Unit Eselon I dalam struktur organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM baik di Pusat maupun Daerah. Pembinaan dan koordinasi Sekretariat Jenderal dengan seluruh satuan kerja dilaksanakan dalam bidang perencanaan dan penganggaran,

penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, pengelolaan Teknologi Informasi, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan keuangan, pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerja sama kelembagaan, luar negeri dan pemberian informasi dan komunikasi kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan di lingkungan Kementerian, pembinaan tata persuratan dan kearsipan serta pemberian layanan pada pimpinan.

E. ISU STRATEGIS

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu strategis dalam lingkup kinerja Sekretariat Jenderal Khususnya dan Kementerian Hukum dan HAM umumnya yaitu :

1. Belum ada pedoman penyusunan indikator kinerja Utama dan manual indikator kinerja Utama;
2. Kantor wilayah khususnya bagian PPH belum seluruhnya melakukan pembinaan penyusunan rencana kerja dan anggaran baik dalam penyusunan dokumen rencana kerja maupun data dukungnya, sehingga masih ditemukan ketidaksesuaian dokumen anggaran satuan kerja dengan postur anggaran, satuan biaya sesuai SBM maupun ketidaklengkapan data pendukung yang berdampak banyaknya catatan dalam reviu dan penelitian RKAKL;
3. Menurunnya nilai indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM;
4. Satuan Kerja belum optimal dalam memahami redaksional Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sehingga Tindak Lanjut yang dilaksanakan kurang tepat dan tetap harus ditindaklanjuti sampai sesuai Rekomendasi;
5. Pengelolaan Pemanfaatan BMN Kementerian Hukum dan HAM Tidak Optimal;
6. Masih terdapat aset yang tidak berfungsi baik dan aman;
7. Masih terdapat temuan berulang terkait permasalahan sertifikat aset tanah;
8. Belum adanya rekonsiliasi data hasil penilaian kompetensi bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, jadi belum dapat digunakan dalam hal manajemen talenta;
9. Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM perlu disempurnakan karena terdapat perubahan jabatan dan kebijakan;
10. Menurunnya nilai IKPA Kementerian Hukum dan HAM;
11. Rendahnya nilai Indeks Profesionalitas ASN Kementerian Hukum dan HAM.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan Laporan Kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

BAB I

PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang penulisan laporan, gambaran umum organisasi dan sistematika penulisan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, meliputi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.

BAB IV

PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 dan saran yang diperlukan bagi perbaikan di masa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra–KL) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional). Renstra merupakan platform Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM atas pelaksanaan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya dan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024. Pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Sekretariat Jenderal adalah untuk mencapai Visi Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa Visi Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, ditetapkan **Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024** adalah:

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal,
Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada
Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden
dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

b. Misi

Untuk terwujudnya Visi Kementerian Hukum dan HAM tersebut serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ditetapkanlah **Misi Kementerian Hukum dan HAM** sebagai berikut:

- 1) Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional.
- 2) Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas.
- 3) Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- 4) Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan.
- 5) Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- 6) Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan.
- 7) Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Sekretariat Jenderal sebagai supporting unit bagi Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab mensukseskan misi Kementerian Hukum dan HAM yang Nomor 7 yaitu “Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan”. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan. Misi ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Misi ke-7 tersebut, diterjemahkan ke dalam **Misi Sekretariat Jenderal** yaitu :

- 1) Melaksanakan perencanaan dan penganggaran secara SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Reliable, Time bond) dan akuntabel;
- 2) Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan sesuai peraturan perundangan;
- 3) Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia secara profesional dan akuntabel;
- 4) Melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel;
- 5) Melaksanakan fungsi pelayanan umum yang cepat dan responsif;
- 6) Melaksanakan kehumasan dan fasilitasi kerjasama.

c. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

- 1) Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk **mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.**
- 2) Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk **mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.**
- 3) Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk **mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan**

serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

- 4) Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk **terlindunginya hak asasi manusia**.
- 5) Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk **meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan**.
- 6) Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk **menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/NI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan**.
- 7) Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk **mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM**.

Sejalan dengan tujuan Kementerian Hukum dan HAM terutama pada tujuan ke 7 “Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM”, maka **Tujuan Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024** sebagai berikut;

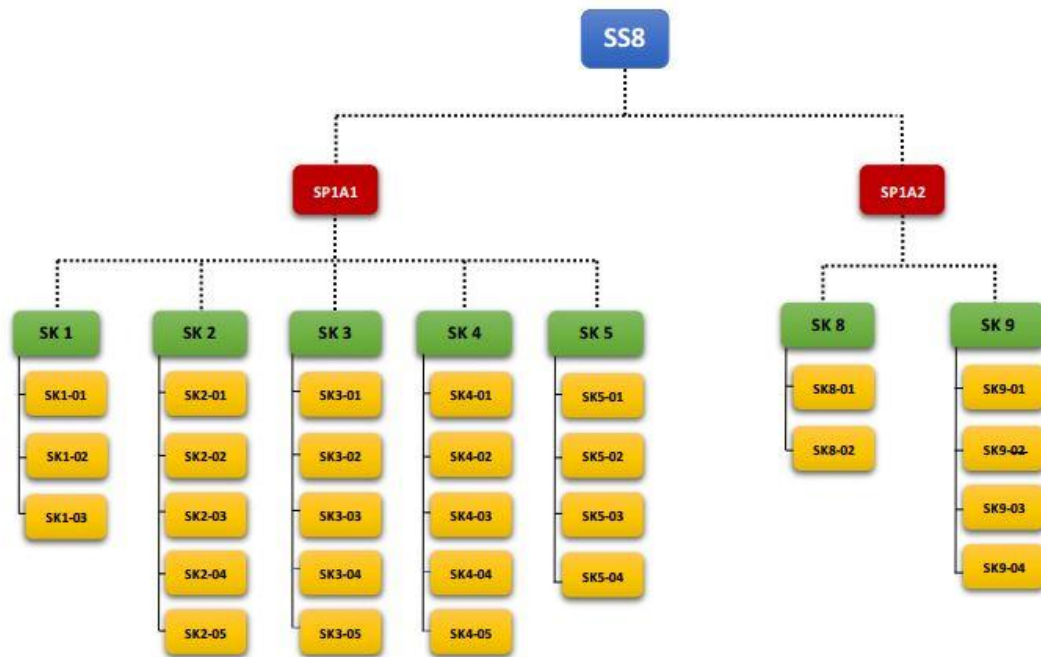
- 1) Terwujudnya perencanaan dan penggaran berbasis kinerja secara SMART dan akuntabel;
- 2) Terwujudnya budaya kerja “Kami PASTI” sesuai dengan tata nilai Kementerian Hukum dan HAM;
- 3) Terkelolanya ASN Kemenkumham dengan baik dan professional sesuai manajemen ASN;
- 4) Penggunaan keuangan negara yang efektif;
- 5) Adanya kepuasan pegawai atas layanan Sekretariat Jenderal;
- 6) Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM.

2. Sasaran Strategis

Dari beberapa Tujuan yang hendak dicapai, ditentukanlah Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM yang pengukurannya menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact. Pada tahun 2021 ada 8 (delapan) Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI yang diampu oleh 11 (sebelas) Unit Eselon 1 (satu) yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Hukum dan HAM.

Sasaran Strategis Ke-8 yaitu Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien, dapat tercapai dengan dukungan Program Dukungan Manajemen yang dijalankan oleh Unit Sekretariat Jenderal. Terkait dengan Misi ke-7 (tujuh) Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan. Sekretariat Jenderal memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan terwujudnya ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten serta terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM RI.

Untuk mencapai Sasaran Strategis Ke-8, maka ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor SEK.1-PR.01.04-310 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Sasaran strategis Sekretariat Jenderal tersebut diadaptasi dari metode *balanced scorecard* yang menggunakan 3 (tiga) perspektif yaitu *learning and growth*, *internal bussines process*, *external stakeholder*. Ketiga perspektif tersebut digambarkan dalam peta strategis Sekretariat Jenderal yang memvisualisasikan keterkaitan hubungan antar sasaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun alur *cascading* dari sasaran strategi, sasaran program sampai dengan kegiatan dapat dilihat pada diagram dan matrik sebagai berikut:



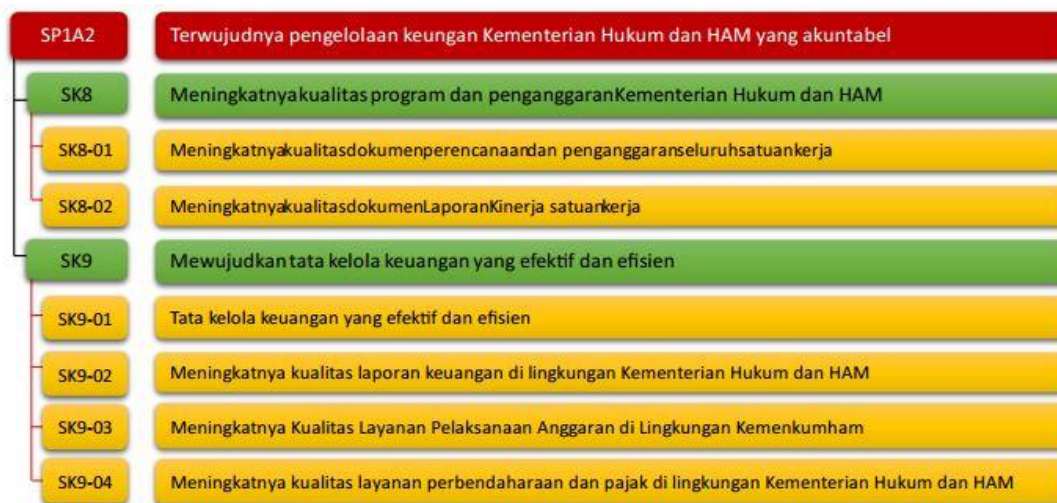
Keterangan :

1. SS = Sasaran Strategis;
2. SP = Sasaran Program;
3. SK = Sasaran Kegiatan

Gambar 2.1 Alur *Cascading* Sasaran Strategi, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Sekretariat Jenderal

POHON KINERJA RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2020-2024





Gambar 2.2 Alur Pohon Kinerja Sekretariat Jenderal

3. Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

Dalam mendukung Sasaran Strategis ke-8 dan misi ke-7 Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan kebijakan dan strategi sebagai berikut

a. Bidang Perencanaan

- 1) **Kebijakan** : Meningkatkan nilai RB Kementerian Hukum dan HAM

Strategi :

- Menyusun dan menyempurnakan buku pedoman RB;
- Mengoptimalkan penggunaan E-RB;
- Melakukan monitoring dan evaluasi target kinerja pelaksanaan RB dari masing-masing satuan kerja.

- 2) **Kebijakan** : Meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM

Strategi :

- Menyusun indikator kinerja seluruh jabatan;
- Menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V;
- Melakukan pendampingan ke unit eselon I.

- 3) **Kebijakan** : Penataan Kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Strategi :

- Penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional;
- Melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM.

b. Bidang Kepegawaian

- 1) **Kebijakan** : Meningkatkan kepuasan pegawai atas layanan kepegawaian

Strategi :

- Penerimaan CPNS/Poltekkip/Poltekim secara profesional, akuntabel dan transparan;
- Proses pengurusan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akuntabel;
- Kenaikan pangkat otomatis.

- 2) **Kebijakan** : Pengendalian jumlah dan komposisi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sesuai kebijakan zero growth

Strategi :

- Penyusunan analisa beban kerja untuk menentukan jumlah standar yang dibutuhkan dalam bidangnya agar efektif dan efisien;
- Penyusunan Analisis Jabatan sebagai dasar untuk melakukan mutasi, promosi, training pegawai dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- Peningkatan kompetensi pegawai di bidang sosio-cultural,manajerial, teknis;
- Pengembangan dan implementasi jabatan fungsional Kementerian Hukum dan HAM;
- Penyusunan manajemen karir pegawai.

c. Bidang Keuangan

- 1) **Kebijakan** : Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Strategi :

- Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Anggaran;
- Efektivitas pengelolaan hibah melalui e-Monev Hibah;
- Evaluasi dan peninjauan kembali terhadap Kebijakan dan SOP Pengelolaan Keuangan;
- Penguatan kompetensi dan koordinasi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan.

- 2) **Kebijakan** : Meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian.

Strategi :

- Melakukan Bimbingan Teknis pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);

- Melakukan Monitoring dan Evaluasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah;
 - Menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja dalam meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
- 3) **Kebijakan** : Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM

Strategi :

- Menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mulai dari tingkat satuan kerja hingga tingkat Kementerian;
- Pemutakhiran Kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- Mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- Meningkatkan Kualitas SDM Penyusun Laporan Keuangan melalui Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi.

d. Bidang Pengelolaan BMN

- 1) **Kebijakan** : Terwujudnya RKBMN Kementerian Hukum dan HAM yang akurat.

Strategi :

- Menyusun dan merencanakan rencana kebutuhan BMN;
- Mengoptimalkan penggunaan aplikasi REKAN;
- Melakukan pendampingan ke seluruh Satuan Kerja dalam penyusunan RKBMN;
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKBMN.

- 2) **Kebijakan** : Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan.

Strategi :

- Penguatan terhadap UKPBJ di seluruh wilayah dalam rangka upaya penurunan nilai temuan terkait pengadaan Barang/Jasa;
- Mengoptimalkan penggunaan SIPASTIKU sebagai monitoring kegiatan;
- Melakukan pendampingan dan konsekuensi teknis proses pengadaan Barang/Jasa.

- 3) **Kebijakan** : Penyelesaian Penggunaan dan Pemanfaatan BMN Kementerian Hukum dan HAM.

Strategi :

- Membuat peta permasalahan pemanfaatan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- Penyelesaian pengajuan rekomendasi atas usul penggunaan dan pemanfaatan BMN;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap permasalahan penggunaan dan pemanfaatan BMN Kementerian Hukum dan HAM.

4) **Kebijakan** : Kebijakan strategis pencatatan BMN Kementerian Hukum dan HAM.

Strategi :

- Terwujudnya BMN Kementerian Hukum dan HAM yang tervalidasi;
- Penertiban pencatatan atas aset BMN Kementerian Hukum dan HAM;
- Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan BMN.

5) **Kebijakan** : Pemusnahan dan Penghapusan BMN Kementerian Hukum dan HAM.

Strategi :

- Melakukan pemetaan BMN di Kementerian Hukum dan HAM yang akan dilakukan pemusnahan dan penghapusan;
- Menyusun BMN Kementerian Hukum dan HAM yang tidak atau dapat dipindahtangankan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi.

e. Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama

1) **Kebijakan** : Opini positif terhadap pemberitaan Kemenkumham RI.

Strategi :

- Menyusun peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Kemenkumham;
- Mengoptimalkan penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan Media online;
- Melakukan pembinaan pemberitaan intern dan extern di lingkungan Kemenkumham;
- Melakukan monitoring dan evaluasi pemberitaan di lingkungan Kemenkumham.

2) **Kebijakan** : Pemberitaan dan publikasi Kemenkumham yang terintegrasi.

Strategi :

- Menyusun peraturan tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Kemenkumham;
- Mengoptimalkan pemberitaan dan publikasi melalui surat kabar, katalog, majalah, situs, buku, CD dll;

- Melakukan pembinaan;
- Melakukan monev dan evaluasi.

f. Bidang Umum

- 1) **Kebijakan** : Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM.

Strategi :

- Penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) sehingga dapat diperoleh regulasi arsip yang lebih terarah dan terukur;
- Pembinaan kearsipan dengan penerapan standar pengelolaan kearsipan diseluruh unit utama Kantor Wilayah dan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- Monitoring dan Pengawasan kearsipan secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan NSPK di seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah, dan Satuan Kerja lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

- 2) **Kebijakan** : Pelaksanaan Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Tata Usaha/Persuratan Pimpinan Secara Cepat dan Terintegrasi.

Strategi :

- Pengoptimalan Penggunaan Sisumaker dalam Penatausahaan Persuratan Pimpinan;
- Meningkatkan Pelayanan Pimpinan dalam pelaksanaan Koordinasi Pimpinan.

- 3) **Kebijakan** : Meningkatkan Kesehatan Jasmani dan Rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM.

Strategi :

- Mengoptimalkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan SOP yang selalu disempurnakan;
- Mensosialisasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
- Melakukan Kegiatan Ceramah Keagamaan dengan Narasumber yang berkompeten di bidangnya.

- 4) **Kebijakan** : Meningkatkan Layanan Sarana dan Prasarana Internal dan Pemenuhan Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan dan perkantoran secara tepat waktu.

Strategi :

- Mengoptimalkan penggunaan Aplikasi E-Rumga;
- Peningkatan Layanan Pemeliharaan Sarana Fisik dan Sarana Lainnya;

- Peningkatan Pengelolaan dan Penertiban Barang Milik Negara tingkat Satuan Kerja Sekretariat Jenderal;
- Peningkatan Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sewa Barang Milik Negara yang tercatat sebagai aset Sekretariat Jenderal;
- Sosialisasi Pengelolaan Penghematan Energi dan Air Kepada Unit Utama dan Seluruh Kantor Wilayah.

5) **Kebijakan** : Peningkatan Pembinaan Layanan Keprotokolan dan Keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Strategi :

- Implementasi Keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 31 Tahun 2018 di tingkat pusat dan wilayah;
- Optimalisasi koordinasi acara pimpinan dan penggunaan aplikasi E-agenda Pimpinan;
- Peningkatan pembinaan, pelatihan dan pemenuhan sarana prasana personil keamanan pimpinan;
- Penataan layanan Keamanan lingkungan terpadu di area unit Pusat.

4. Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi di Masa Pandemi Covid 19 (Pola Kerja *New Normal*)

Pada masa pandemi covid-19, kebijakan dan strategi yang akan dijalankan Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi serta dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Kebijakan	Strategi	Target Capaian
Evaluasi Aturan Work From Home	Mengevaluasi efisiensi penerapan <i>Work From Home</i> (WFH)	Dilaksanakan sesuai aturan Kementerian yang mengatur Aparatur Negara
Optimalisasi Fasilitas SUMAKER	Memanfaatkan fasilitas SUMAKER untuk surat menyurat	Terselenggaranya proses surat menyurat secara <i>online</i>
Pembuatan Protokol Kesehatan Kementerian Hukum dan HAM	Menyusun aturan protocol Kesehatan yang menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM	Dibuat dalam bentuk Keputusan Menteri

Kebijakan	Strategi	Target Capaian
Evaluasi Kinerja Anggaran	Melakukan efisiensi dan optimalisasi beberapa kegiatan yang bukan prioritas	Dilakukan melalui mekanisme revisi
Penguatan sarana teknologi informasi	Menambah <i>bandwidth</i> untuk kelancaran proses pelaksanaan tugas fungsi berbasis teknologi informasi	Dilakukan pada seluruh unit kinerja

Tabel 2.1 Kebijakan Strategis Sekretariat Jenderal pada Masa Pandemi Covid-19

5. Kerangka Kelembagaan

Arah kebijakan penataan kelembagaan Sekretariat Jenderal ditujukan untuk mendukung kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM antara lain di bidang pembentukan dan penataan regulasi, pelayanan publik di bidang hukum, penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum dan pemajuan HAM, tata kelola pemerintahan, yang sesuai dengan perannya sebagai unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas kordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.

Optimalisasi penggunaan jabatan fungsional dengan keahlian atau keterampilan tertentu akan terus didorong implementasinya sejalan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta amanat Presiden pada tanggal 20 Oktober 2019 terkait penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi melalui optimalisasi jabatan fungsional merupakan salah satu upaya untuk menghadapi berbagai tantangan kedepan dengan tujuan untuk memberikan layanan yang cepat kepada *stakeholders*, serta untuk mewujudkan organisasi yang agile, dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah :

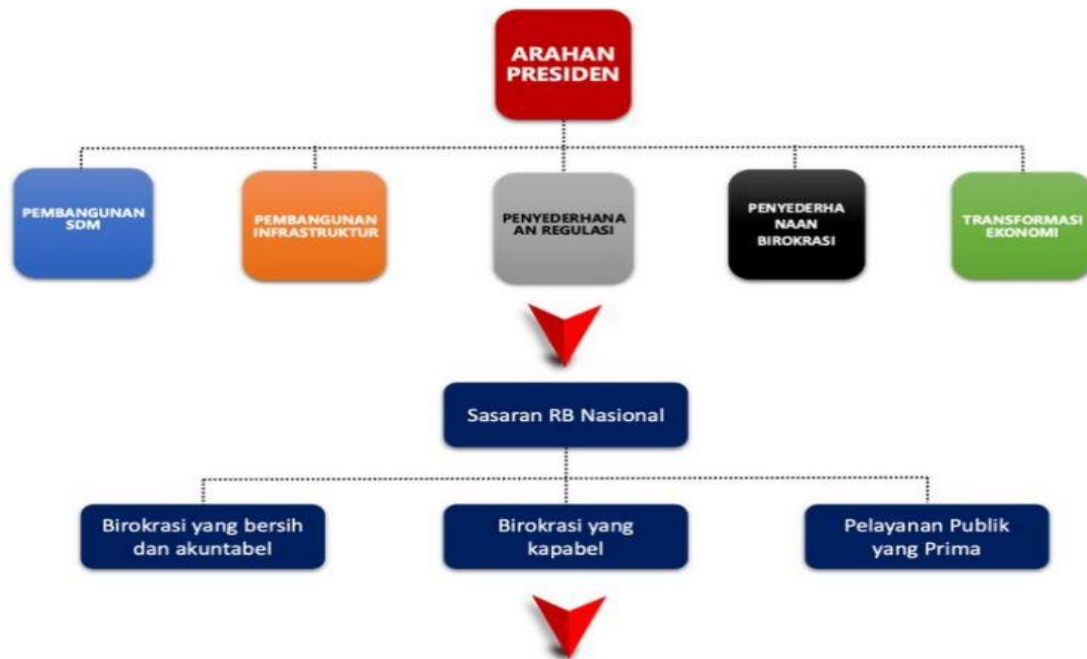
- Pemetaan tugas dan fungsi di setiap jenjang jabatan, untuk mengidentifikasi atas tugas-tugas yang tumpang tindih antar biro maupun dengan Unit Eselon I, penguatan tugas dan fungsi yang selama ini belum tarakomodir dalam ORTA;
- Penataan organisasi dan tata kerja (perubahan struktur organisasi) yang selaras dengan implementasi penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan jabatan fungsional;
- Mereposisi tugas dan fungsi yang sejalan dengan kebijakan redesain

program dan anggaran.

6. Kebijakan Reformasi Birokrasi

Dalam hal pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain :

- Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
- Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi;
- Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.



Gambar 2.3 Kebijakan Reformasi Birokrasi

KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
MANAJEMEN PERUBAHAN	Penguatan terhadap penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi	Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi
	Peningkatan internalisasi sistem nilai dan integritas Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN Kemenkumham

KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
		2. Penerapan manajemen risiko terhadap kegiatan di lingkungan Kemenkumham
REGULASI KEBIJAKAN	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Menata berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Program Deregulasi Kebijakan
PENATAAN TATA LAKSANA	Terwujudnya proses bisnis yang melayani seluruh stakeholder dalam dan luar dengan sebaik-baiknya	Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	Peningkatan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat terukur, sederhana transparan, partisipatif dan berbasis e-gov	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui peningkatan kinerja di lingkungan Kemenkumham
PENATAAN SDM APARATUR	Meningkatnya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing	1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kemenkumham 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kemenkumham 3. Meningkatkan disiplin SDM aparatur di lingkungan Kemenkumham 4. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Kemenkumham 5. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Kemenkumham
PENGUATAN PENGAWASAN	Opini WTP dan tingkat kematangan implementasi SPIP	1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kemenkumham 2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kemenkumham 3. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kemenkumham
PENGUATAN AKUNTABILITAS	Peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi	Meningkatkan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kemenkumham

KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
	Peningkatan mutu perumusan, pengelolaan dan evaluasi kebijakan/program dan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah di lingkungan Kemenkumham
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan Kemenkumham 2. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di lingkungan Kemenkumham 3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kemenkumham.

Tabel 2.2 Kebijakan dan Strategis Reformasi Birokrasi

B. PERJANJIAN KINERJA

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dengan Perjanjian Kinerja menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan SAKIP.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Penyusunan Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RKA-KL yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target kinerja yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Spesifik (*specific*);
2. Dapat terukur (*measurable*);
3. Dapat tercapai (*attainable*);
4. Berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
5. Dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

Tujuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pada tahun 2023 dalam RKA Sekretariat Jenderal, ditetapkan bahwa Sekretariat Jenderal mengemban Program Dukungan Manajemen. Program tersebut diukur dengan 2 (dua) Sasaran Program dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Program yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS JENDERAL DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI**

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Presentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal “BB”	94%
	2. Presentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94%

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.861.070.505.000,-

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sekretaris Jenderal

Pencapaian 2 (dua) Sasaran Program dan 3 (tiga) Indikator Kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik, terarah dan terencana jika dilakukan dengan kegiatan secara berkesinambungan dan sinergis oleh 6 (enam) Biro yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal sesuai dengan Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM “PASTI” (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) dan *core value* ASN “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) yaitu :

1. Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM;
2. Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM;
3. Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM;
4. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja;
5. Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM.
6. Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM;

Adapun Target Kinerja masing-masing kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen RKA Sekretariat Jenderal Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran
Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya Citra Positif Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Opini Positif terhadap Pemberitaan Kementerian Hukum dan HAM di Media	90%	Rp. 7.497.932.000,-
Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat didalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement	95%	Rp.29.993.203.000,-

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran
Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Efektif dan Efisien	Persentase Satuan Kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93	100%	Rp.9.366.611.000,-
Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja	Terwujudnya Organisasi Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang Efektif dan Efisien	Presentase Satuan Kerja yang Mengimplementasikan 8 Area Perubahan	95%	Rp. 15.678.202.000,-
	Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	Presentase Satuan Kerja yang Mendapatkan Nilai SMART di atas 95	100%	
Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM	Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung Tusi sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%	Rp. 10.608.327.000,-
		2. Persentase menurunnya Nilai Temuan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	10%	
Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Pegawai yang Puas atas Layanan Umum Internal Kesekjenan	95%	Rp. 4.787.926.230.000,-

Tabel 2.4 Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Jenderal 2023

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas Kinerja adalah amanat dari para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Akuntabilitas pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolok ukur pengukuran kinerja, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan, kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Sekretariat Jenderal merupakan kinerja kolektif dari seluruh Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal. Pada Tahun 2023, Sekretariat Jenderal mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 4.755.936.194,000,-** (setelah revisi terakhir) untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Dalam memudahkan dalam monitoring capaian Perjanjian Kinerja, dilakukan klasifikasi capaian berdasarkan rentang nilai. Adapun klasifikasi capaian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Capaian	Warna	Keterangan
>100		Sangat Baik
85 s.d. 100		Baik
70 s.d. <85		Cukup
55 s.d. <70		Kurang
<55		Sangat Kurang

Tabel 3.1 Klasifikasi Capaian

Secara umum Pencapaian Sasaran Program Sekretariat Jenderal Tahun 2023 dapat dikategorikan memenuhi target yang telah ditetapkan. Secara rinci capaian kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Program	No.	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian	Status
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1.	Presentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal “BB”	94%	100%	106,38%	Sangat Baik
	2.	Presentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94%	93,18%	99,13%	Baik
Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	3.	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP	WTP	100%	Baik

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023

SASARAN PROGRAM 1 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENGAN MENGOPTIMALKAN KUALITAS LAYANAN BERBASIS TI

1. Indikator Kinerja Program Ke-1 : Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal “BB”

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-1

Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	Status
Presentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal “BB”	94%	100%	106,38%	• 1 Kantor Wilayah mendapatkan nilai “AA” • 9 Unit Eselon I dan 32 Kantor Wilayah mendapatkan nilai “A” • 2 Unit Eselon I mendapatkan nilai “BB”	Sangat Baik

Tabel 3.3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-1

Inspektorat Jenderal melakukan panel evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum dan HAM terhadap 11 Unit Eselon I dan 33 Kantor Wilayah. Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Nomor ITJ-PW.03.01-159 tanggal 30 Mei 2023 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Dari

penilaian tersebut, capaian yang diperoleh dari masing-masing Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Nilai	Predikat
Unit Eselon I			
1	Sekretariat Jenderal	82,25	A
2	Inspektorat Jenderal	84,05	A
3	Ditjen Administrasi Hukum Umum	83,00	A
4	Ditjen Pemasyarakatan	82,85	A
5	Ditjen Imigrasi	80,00	BB
6	Ditjen Kekayaan Intelektual	84,80	A
7	Ditjen Peraturan Perundang-undangan	82,40	A
8	Ditjen Hak Asasi Manusia	76,10	BB
9	Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	80,90	A
10	Badan Pembinaan Hukum Nasional	80,15	A
11	BPSDM Hukum dan HAM	81,20	A
Kantor Wilayah			
1	D.I Yogyakarta	95	AA
2	Sulawesi Tengah	87,5	A
3	Sulawesi Selatan	87,5	A
4	Gorontalo	87,5	A
5	Jawa Tengah	87,5	A
6	Jawa Timur	87,5	A
7	DKI Jakarta	87,5	A
8	Bali	87,5	A
9	Nusa Tenggara Timur	87,5	A
10	Nusa Tenggara Barat	87,5	A
11	Aceh	87,5	A
12	Sumatera Selatan	87,5	A
13	Sumatera Barat	87,5	A
14	Bengkulu	87,5	A
15	Kepulauan Riau	87,5	A
16	Riau	87,5	A
17	Bangka Belitung	87,5	A
18	Jambi	87,5	A
19	Sulawesi Tenggara	87,5	A

No.	Satuan Kerja	Nilai	Predikat
20	Papua	87,5	A
21	Papua Barat	87,5	A
22	Kalimantan Barat	87,5	A
23	Kalimantan Tengah	87,5	A
24	Kalimantan Selatan	87,5	A
25	Kalimantan Timur	87,5	A
26	Maluku	87,5	A
27	Maluku Utara	87,5	A
28	Sumatera Utara	86,9	A
29	Sulawesi Utara	86,6	A
30	Jawa Barat	86	A
31	Banten	86	A
32	Sulawesi Barat	83,3	A
33	Lampung	82,7	A

Tabel 3.4 Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Akuntabilitas Kinerja 1 Kantor Wilayah mendapatkan nilai “AA”, 9 Unit Eselon I dan 32 Kantor Wilayah mendapatkan nilai “A” dan 2 Unit Eselon I mendapatkan nilai “BB”. 11 Unit Eselon I dan 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, seluruhnya mendapatkan Nilai AKIP minimal “BB”. Sehingga realisasi Indikator Kinerja Program Ke-1 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"}}{\sum \text{Satuan Kerja yang Dievaluasi oleh APIP}} \times 100\%$$

$$\frac{44}{44} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Program Ke-1 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Program Ke - 1}$$

$$\frac{100}{94} \times 100\% = \mathbf{106,38\%}$$

b. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2023 dengan Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2022.

Indikator Kinerja Program	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Keterangan
Presentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	100%	100%	Realisasi pada tahun 2023 sama dengan realisasi pada tahun 2022 yakni 100%.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2023 dengan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2022

Perbandingan capaian nilai AKIP Unit Eselon I Tahun 2022 dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Tahun 2023		Tahun 2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
Unit Eselon I					
1	Sekretariat Jenderal	82,25	A	81,80	A
2	Inspektorat Jenderal	84.05	A	83,90	A
3	Ditjen Administrasi Hukum Umum	83.00	A	82,55	A
4	Ditjen Pemasyarakatan	82,85	A	82,85	A
5	Ditjen Imigrasi	80,00	BB	80,60	A
6	Ditjen Kekayaan Intelektual	84,80	A	84,35	A
7	Ditjen Peraturan Perundang-undangan	82,40	A	81,95	A
8	Ditjen Hak Asasi Manusia	76,10	BB	75,05	A
9	Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	80,90	A	80,75	A
10	Badan Pembinaan Hukum Nasional	80,15	A	79,25	BB
11	BPSDM Hukum dan HAM	81,20	A	80,60	A
Kantor Wilayah					
1	D.I Yogyakarta	95	AA	80,15	A
2	Sulawesi Tengah	87,5	A	75,35	BB
3	Sulawesi Selatan	87,5	A	74,60	BB
4	Gorontalo	87,5	A	71,90	BB
5	Jawa Tengah	87,5	A	74,15	BB

No.	Satuan Kerja	Tahun 2023		Tahun 2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
6	Jawa Timur	87,5	A	75,35	BB
7	DKI Jakarta	87,5	A	82,40	A
8	Bali	87,5	A	78,20	BB
9	Nusa Tenggara Timur	87,5	A	77,15	BB
10	Nusa Tenggara Barat	87,5	A	77	BB
11	Aceh	87,5	A	74,30	BB
12	Sumatera Selatan	87,5	A	78,20	BB
13	Sumatera Barat	87,5	A	80,45	A
14	Bengkulu	87,5	A	74,60	BB
15	Kepulauan Riau	87,5	A	75,80	BB
16	Riau	87,5	A	76,70	BB
17	Bangka Belitung	87,5	A	75,80	BB
18	Jambi	87,5	A	76,55	BB
19	Sulawesi Tenggara	87,5	A	80	BB
20	Papua	87,5	A	77,75	BB
21	Papua Barat	87,5	A	73,70	BB
22	Kalimantan Barat	87,5	A	72,50	BB
23	Kalimantan Tengah	87,5	A	80,90	A
24	Kalimantan Selatan	87,5	A	80	BB
25	Kalimantan Timur	87,5	A	74,45	BB
26	Maluku	87,5	A	76,25	BB
27	Maluku Utara	87,5	A	73,55	BB
28	Sumatera Utara	86,9	A	78,65	BB
29	Sulawesi Utara	86,6	A	79,10	BB
30	Jawa Barat	86	A	79,40	BB
31	Banten	86	A	76,55	BB
32	Sulawesi Barat	83,3	A	76,70	BB
33	Lampung	82,7	A	73,40	BB

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Nilai AKIP Tahun 2023 dengan Tahun 2022

c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024, salah satu yang menjadi kebijakan pokok adalah meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM. Adapun perbandingan realisasi Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah adalah sebagai berikut:

Sasaran Program/ Indikator	Target				Realisasi
	2021	2022	2023	2024	2023
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI					
Presentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal “BB”	92%	93%	94%	95%	100%

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024, capaian Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2023 telah melebihi target jangka menengah.

d. Penyebab Keberhasilan Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2023

Pada Indikator Kinerja Program Ke-1 dapat tercapai bahkan melebihi target karena telah dilakukan beberapa strategi percepatan implementasi SAKIP diantaranya:

- 1) Melakukan penyusunan Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022;
- 2) Telah diterbitkannya Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- 3) Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024;
- 4) Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

e. Kendala dan Solusi Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2023

1) Kendala

Dalam pencapaian indikator Presentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal “BB”, terdapat kendala dalam rangka mewujudkannya diantaranya:

- a) Pelaksanaan pemenuhan aspek keberadaan, aspek kualitas, dan aspek pemanfaatan pada masing-masing komponen belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
- b) Pelaksanaan teknis penilaian mandiri atas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang perlu dilaksanakan sampai dengan tingkat satuan kerja;
- c) Perlu dilaksanakan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja oleh masing-masing Unit, sehingga terdapat perbaikan dan jaminan akuntabilitas kinerja secara berkesinambungan.

2) Solusi

Terdapat beberapa solusi untuk mengatasi kendala di atas diantaranya:

- a) Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pemenuhan aspek keberadaan, kualitas, dan pemanfaatan. Identifikasi kelemahan, celah, atau masalah lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan kriteria. Setelah itu, buat rencana perbaikan berkelanjutan dan tindakan perbaikan yang relevan. Proses ini harus berulang dan terus menerus secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa pemenuhan kriteria terus ditingkatkan;
- b) Memanfaatkan teknologi informasi (e-performance Kemenkumham) untuk melakukan penilaian mandiri atas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang sampai dengan tingkat satuan kerja;
- c) Perkuat sistem pengawasan dan pemantauan secara reguler untuk mengevaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja. Pastikan ada mekanisme yang jelas untuk melacak dan melaporkan kemajuan, mencatat pencapaian dan kendala yang dihadapi, serta mengidentifikasi peluang perbaikan. Dalam hal ini, dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan pengumpulan data dan analisis (e-performance Kemenkumham).

2. Indikator Kinerja Program Ke-2 : Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-2

Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	Status
Presentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94%	93,18%	99,13%	• 11 Unit Eselon I dan 30 Kantor Wilayah mendapatkan nilai minimal 90 • 3 Kantor Wilayah mendapatkan nilai di bawah 90	Baik

Tabel 3.8 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-2

Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023 hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Terkait hal tersebut, khususnya evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, pada tahun 2023 dilakukan penghentian kegiatan pengisian PMPRB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Namun untuk mendapatkan gambaran perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan, setiap instansi pemerintah diminta menyampaikan informasi praktik baik pelaksanaan reformasi birokrasi di instansinya berupa inovasi yang berdampak kepada masyarakat dan *stakeholders*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyampaikan informasi praktik baik reformasi birokrasi sebanyak 54 (lima puluh empat) usulan, dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Nama Inovasi Praktik Baik
1	Sistem Monitoring Evaluasi Bahan Makanan Kementerian Hukum dan HAM (SIMONEV BAMA KUMHAM)
2	SI DIYANK KALSEL
3	SIBBIRU (Sistem Informasi Basan Baran Integrasi Rupbasan)
4	PELAYANAN P3KRPHD
5	Opini Kebijakan
6	Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)
7	SIHARMON KALSEL
8	OPERA (Obrolan Perancang)
9	Partisipasiku
10	E-Perancang
11	SILABAKUM (SISTEM LAYANAN BANTUAN HUKUM)
12	Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa (Posyankumhamdes)
13	Aplikasi PORSIBEL (Portal Informasi dan Layanan Kanwil Kumham Babel)
14	Rumah Belajar Kemenkumham yang dapat diakses melalui https://rumahbelajar.kemenkumham.go.id/
15	Aplikasi Helpdesk Pengaduan Masyarakat Kantor Imigrasi Yogyakarta (SEPAKAT KARYO)
16	PEMBERIAN BANTUAN HUKUM GRATIS BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
17	Publikasi Formasi Jabatan Notaris Secara <i>Realtime</i>
18	jdihn.go.id
19	Apostille
20	Fidusia Online
21	Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Versi AHU-online
22	I-MED LAPS (Layanan Antar Paspur Selesai) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan
23	I-MED LARASATI (Layanan Rumah Sakit Sepenuh Hati)-Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan
24	SAME DAY SERVICE BAP PASPOR - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan
25	SAME DAY SERVICE WNA-Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan
26	I-MED PRIORITAS-Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan
27	Sekolah NKRI
28	Sidbankum
29	Perseroan Perorangan
30	M-Paspor
31	Eazy Passport
32	Visa online
33	Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC)
34	Mobile Intellectual Property Clinic (MIC)

No	Nama Inovasi Praktik Baik
35	Persetujuan Otomatis Perpanjangan Merek (POP Merek)
36	DJKI Aktif Belajar dan Mengajar
37	E-Journal
38	E-Pengundangan
39	Regulasio
40	E-Partisipasi Publik
41	E-Monev Legislasi
42	Yassona Mendengar
43	Roving Seminar
44	Sertifikasi Pusat Berbelanja Berbasis Kekayaan Intelektual
45	SILINDA
46	E-Book
47	SIPKUMHAM (Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM)
48	SADAR (SISTEM ARSIP DATA RKA-KL) - KANWIL KALTIM
49	KENDI (KENDARAAN DINAS) - KANWIL KALTIM
50	3AS Survey Management
51	SIPAKUMHAMGO (Sistem Informasi Pengendalian Akuntabilitas Kinerja)
52	Aplikasi SERAYA (Sistem Pelaporan Harta Kekayaan)
53	LAPAK IKAN (LAYANAN PASPOR KELILING IMIGRASI TARAKAN)
54	E-Rumga (Elektronik Rumah Tangga)

Tabel 3.9 Informasi Praktik Baik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dalam pencapaian indikator program ke-2, dilakukan penilaian melalui hasil capaian Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Adapun hasil capaian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Capaian
Unit Eselon I		
1	Sekretariat Jenderal	100%
2	Inspektorat Jenderal	100%
3	Ditjen Peraturan Perundang-undangan	100%
4	Ditjen Administrasi Hukum Umum	100%
5	Ditjen Pemasyarakatan	100%
6	Ditjen Imigrasi	100%
7	Ditjen Kekayaan Intelektual	100%

No.	Satuan Kerja	Capaian
8	Ditjen Hak Asasi Manusia	100%
9	Badan Pembinaan Hukum Nasional	100%
10	Badan Startegi Kebijakan Hukum dan HAM	100%
11	BPSDM Hukum dan HAM	100%
Kantor Wilayah		
1	Kanwil Aceh	93,90%
2	Kanwil Sumatera Utara	90,10%
3	Kanwil Sumatera Barat	92,10%
4	Kanwil Riau	98,10%
5	Kanwil Kepulauan Riau	94,90%
6	Kanwil Sumatera Selatan	88,40%
7	Kanwil Jambi	91,30%
8	Kanwil Lampung	98,30%
9	Kanwil Bengkulu	83,70%
10	Kanwil Bangka Belitung	100%
11	Kanwil DKI Jakarta	99,00%
12	Kanwil Banten	100%
13	Kanwil Jawa Barat	100%
14	Kanwil Jawa Tengah	96,30%
15	Kanwil D.I. Yogyakarta	100%
16	Kanwil Jawa Timur	88,60%
17	Kanwil Kalimantan Barat	94,50%
18	Kanwil Kalimantan Selatan	91,40%
19	Kanwil Kalimantan Tengah	100%
20	Kanwil Kalimantan Timur	98,70%
21	Kanwil Sulawesi Utara	95,80%
22	Kanwil Sulawesi Tengah	94,70%
23	Kanwil Sulawesi Selatan	99,80%
24	Kanwil Sulawesi Barat	96,80%
25	Kanwil Sulawesi Tenggara	99,50%
26	Kanwil Gorontalo	100%
27	Kanwil Bali	100%
28	Kanwil NTB	99,30%
29	Kanwil NTT	96,40%

No.	Satuan Kerja	Capaian
30	Kanwil Maluku	95,40%
31	Kanwil Maluku Utara	100%
32	Kanwil Papua	93,50%
33	Kanwil Papua Barat	99,60%

Tabel 3.10 Hasil Capaian Rencana Kerja Tahunan Revormasi Birokrasi Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian RKT RB Tahun 2023, 11 Unit Eselon I dan 30 Kantor Wilayah mendapatkan nilai minimal 90 dan 3 Kantor Wilayah mendapatkan nilai di bawah 90. Realisasi terhadap Indikator Kinerja Program Ke-2 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Satuan Kerja yang Nilai RB min 90}}{\sum \text{Satuan Kerja yang Dinilai}} \times 100\%$$

$$\frac{41}{44} \times 100\% = \mathbf{93,18\%}$$

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Program Ke-2 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Program Ke - 2}$$

$$\frac{93,18\%}{94\%} \times 100\% = \mathbf{99,13\%}$$

b. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-2 Tahun 2023 dengan Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2022

Indikator Kinerja Program	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Keterangan
Presentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	93,18%	90,90%	Terjadi peningkatan realisasi Indikator Kinerja Program Ke-2 Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2022

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-2 Tahun 2023 dengan Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2022

c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-2 Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024, salah satu yang menjadi kebijakan pokok adalah meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi

(RB) Kementerian Hukum dan HAM. Adapun perbandingan realisasi Indikator Kinerja Program Ke-2 Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah adalah sebagai berikut:

Sasaran Program/ Indikator	Target				Realisasi
	2021	2022	2023	2024	2023
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI					
Presentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	92%	93%	94%	95%	93,18%

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-2 Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024, capaian Indikator Kinerja Program Ke-2 Tahun 2023 belum mencapai target jangka menengah.

d. Penyebab Kegagalan Indikator Kinerja Program Ke-2 Tahun 2023

Indikator Kinerja Program Ke-2 tidak tercapai karena masih terdapat Unit Pelaksana Teknis belum mengunggah data yang mendukung pelaksanaan RKT RB Tahun 2023. Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat pentingnya data pendukung dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan implementasi Reformasi Birokrasi. Ketidak patuhan ini dapat berdampak pada pemahaman menyeluruh terkait capaian dan progres masing-masing unit, serta pada evaluasi keseluruhan pelaksanaan RKT RB Tahun 2023. Oleh karena itu, langkah-langkah perlu diambil untuk mendorong dan memastikan partisipasi serta keterlibatan seluruh Unit Pelaksana Teknis guna memastikan integritas dan kelengkapan data yang dibutuhkan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

e. Kendala dan Solusi Indikator Kinerja Program Ke-2 Tahun 2023

1) Kendala

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM terdapat beberapa kendala diantaranya:

- a) Manajemen SDM belum terkelola dengan baik, pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi belum dilakukan secara optimal, baru dilakukan pada Sebagian kecil jabatan;
- b) Capaian PK belum dijadikan dasar sebagai penentuan prestasi kepala Satker;

- c) Inovasi-inovasi yang dilakukan, baik di unit pusat maupun di unit kerja wilayah belum sepenuhnya tersosialisasi dan dipahami dengan baik oleh pengguna layanan;
- d) Mitigasi risiko yang dibangun belum sepenuhnya memetakan risiko yang bersifat strategis untuk mencapai sasaran kinerja baik terkait pelayanan maupun peningkatan integritas;
- e) Monev terhadap pembangunan zona integritas pada Satker WBK/WBBM belum kearah substansi dan keberlangsungan program, masih terbatas pemantauan secara administratif.

2) Solusi

Terdapat beberapa solusi untuk mengatasi kendala di atas diantaranya:

- a) Melakukan analisis kebutuhan SDM dan identifikasi kompetensi yang diperlukan untuk setiap jabatan kritikal/suksesi. Berdasarkan analisis tersebut, buatlah rencana pengembangan SDM yang komprehensif. Rencana ini harus mencakup pelatihan, pendidikan, pengalaman kerja, dan mentoring untuk mengembangkan bakat dan kompetensi yang dibutuhkan dalam jabatan kritikal/suksesi;
- b) Menyampaikan hasil evaluasi capaian PK dan penentuan prestasi kepala Satuan Kerja secara jelas dan transparan. Berikan umpan balik yang konstruktif dan rinci mengenai capaian PK dan penilaian prestasi. Jelaskan keterkaitan antara capaian PK dengan penentuan prestasi secara terbuka agar kepala Satuan Kerja memahami dasar penilaian yang digunakan;
- c) Menyediakan strategi komunikasi yang efektif untuk menyosialisasikan inovasi kepada pengguna layanan. Gunakan berbagai saluran komunikasi, seperti publikasi, media sosial, website, newsletter, dan pertemuan langsung. Komunikasikan manfaat dan nilai tambah inovasi, serta cara penggunaannya dengan jelas dan mudah dipahami oleh pengguna layanan;
- d) Melibatkan seluruh Unit Eselon I dalam penyusunan mitigasi risiko untuk memetakan risiko yang bersifat strategis;
- e) Melakukan pendekatan pemantauan berbasis bukti untuk mengevaluasi capaian dan keberlanjutan program zona integritas. Dalam pemantauan ini, kumpulkan data dan bukti yang relevan, seperti hasil survei kepuasan pengguna layanan, laporan inspeksi atau audit internal, atau dokumentasi kegiatan pengembangan budaya integritas. Data dan bukti

ini akan memberikan informasi yang lebih substantif dan dapat diverifikasi mengenai kemajuan dan keberlanjutan program.

SASARAN PROGRAM 2 : TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YANG AKUNTABEL

3. Indikator Kinerja Program Ke-3 : Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Kemenkumham

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-3

Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	Status
Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP	WTP	100%	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 Nomor: 30.a/LHP/XV/05/2023 tanggal 24 Mei 2023, Kemenkumham memperoleh opini WTP	Baik

Tabel 3.13 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-3

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*. Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*. Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan;
3. Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*. Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
4. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta

memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 Nomor: 30.a/LHP/XV/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atau *unqualified opinion*. Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Program Ke-3 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Program Ke - 3}$$

$$\frac{WTP}{WTP} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

b. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-3 Tahun 2023 dengan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2022

Indikator Kinerja Program	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Keterangan
Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP	WTP	Pada Tahun 2023 dan 2022, atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM adalah memperoleh opini WTP

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-3 Tahun 2023 dengan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2022

Berikut opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM dalam 5 (lima) tahun terakhir:

TAHUN				
2019	2020	2021	2022	2023
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tabel 3.15 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM dalam 5 (lima) Tahun Terakhir

c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-3 Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024, salah satu yang menjadi kebijakan pokok adalah Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrua di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun perbandingan realisasi Indikator Kinerja Program Ke-3 Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah adalah sebagai berikut:

Sasaran Program/ Indikator	Target				Realisasi
	2021	2022	2023	2024	2023
Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel					
Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-3 Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024, realisasi Indikator Kinerja Program Ke-3 Tahun 2023 telah mencapai target jangka menengah.

d. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-3 Tahun 2022 dengan Standar Nasional

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 Nomor: 30.a/LHP/XV/05/2023 tanggal 24 Mei 2023, pada tahun 2022 entitas pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan dilakukan kepada 82 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 1 Bendahara Umum Negara (BUN). Atas pemeriksaan tersebut oleh BPK 81 K/L dan 1 BUN memperoleh Opini WTP dimana Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu K/L yang berhasil memperoleh Opini WTP. Sedangkan terdapat 1 K/L memperoleh Opini WDP yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika

e. Penyebab Keberhasilan Indikator Kinerja Program Ke-3 Tahun 2023

Pada Indikator Kinerja Program Ke-3 dapat tercapai karena telah dilakukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan

menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu dan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta telah diterapkannya Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagai upaya mewujudkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang menjadi salah satu kriteria opini WTP atas Laporan Keuangan.

f. Kendala dan Solusi Indikator Kinerja Program Ke-3 Tahun 2023

1) Kendala

Meski telah mendapatkan opini WTP, masih ditemukan kendala dalam pencapaiannya, diantaranya:

- a) Satker belum optimal dalam memahami redaksional Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sehingga Tindak Lanjut yang dilaksanakan kurang tepat dan tetap harus ditindaklanjuti sampai sesuai Rekomendasi;
- b) Penyetoran pengembalian atau denda ke Kas Negara belum selesai (masih di bawah nilai Rekomendasi pengembalian) karena penyedia Pengadaan Barang Jasa belum melakukan setoran atau tidak diketahui keberadaannya;
- c) Penerapan aplikasi SAKTI dari Kemenkeu sebagai pengganti aplikasi SAIBA, mengakibatkan Operator Satuan Kerja membutuhkan waktu beradaptasi dengan proses bisnis penyusunan LK yang berbeda.

2) Solusi

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan dan BMN yang efektif dilakukan upaya sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pemantauan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan pemeriksaan BPK;
- b) Melaksanakan pemantauan penyetoran pengembalian atau denda ke Kas Negara;
- c) Melaksanakan Pembinaan dan Monev kepada satuan kerja terkait data Laporan Keuangan dan update kebijakan dari Kementerian Keuangan secara periodik.

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 dibiayai dari dana APBN sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SP DIPA-013.01.1.404233/2023 tanggal 30 November 2022 semula sebesar Rp. 4.861.070.505.000,- telah mengalami 23 kali revisi DIPA sehingga menjadi **Rp. 4.755.936.194.000,-**. Berdasarkan data OM-SPAN realisasi anggaran pada Tahun 2023 adalah **Rp. 4.518.893.442.720** atau **95,02%** dari total pagu dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian
Belanja Pegawai	3.909.310.715.000	3.698.778.550.622	210.532.164.378	94,61%
Belanja Barang	680.136.936.000	655.667.965.429	24.468.970.571	96,40%
Belanja Modal	166.488.543.000	164.446.926.669	2.041.616.331	98,77%
Total	4.755.936.194.000	4.518.893.442.720	237.042.751.280	95,02%

Tabel 3.17 Anggaran dan Realisasi Sekretariat Jenderal Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Kemenkumham	8.197.932.000	8.155.238.266	99,48%
2	Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham	98.872.503.000	97.608.801.747	98,72%
3	Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kemenkumham	11.137.985.000	11.076.545.817	99,45%
4	Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan Dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah	23.020.752.000	22.753.553.823	98,84%
5	Pengelolaan Barang Milik Negara Kemenkumham	16.727.090.000	16.625.935.862	99,40%
6	Pelayanan Ketatausahaan Dan Kerumahtanggaan Kemenkumham	3.787.028.212.000	3.570.184.169.978	94,27%
TOTAL		4.755.936.194.000	4.518.893.442.720	95,02%

Tabel 3.18 Anggaran dan Realisasi Per Jenis Kegiatan Tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian
TAHUN 2023				
Belanja Pegawai	3.909.310.715.000	3.698.778.550.622	210.532.164.378	94,61%
Belanja Barang	680.136.936.000	655.667.965.429	24.468.970.571	96,40%
Belanja Modal	166.488.543.000	164.446.926.669	2.041.616.331	98,77%
Total	4.755.936.194.000	4.518.893.442.720	237.042.751.280	95,02%
TAHUN 2022				
Belanja Pegawai	3.801.820.937.000	3.766.120.799.541	35.700.137.459	99,06%
Belanja Barang	456.575.121.000	449.192.031.376	7.383.089.624	98,38%

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian
Belanja Modal	113.331.543.000	112.890.055.569	441.487.431	99,61%
Total	4.371.727.601.000	4.328.202.886.486	43.524.714.514	99,00%

Tabel 3.19 Perbandingan Pagu dan Realisasi Sekretariat Jenderal Tahun 2023 dan 2022

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput Capaian Kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>. Sub Komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 Variabel yaitu:

- Capaian Keluaran, bobot 43,5%
- Penyerapan Anggaran, bobot 28,6%
- Efisiensi, bobot 18,2%
- Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 9,7%.

Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA Sekretariat Jenderal pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Jenderal sebagai Satuan Kerja adalah **88,98**

Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
Sekretariat Jenderal	88,98	94,46	99,19	100	5,54	63,85

Tabel 3.20 Nilai SMART Sekretariat Jenderal sebagai Satuan Kerja Tahun 2023

b. Sekretariat Jenderal sebagai Eselon I adalah **97,33**

Eselon I	Kinerja	CSP	Penyerapan	Konsistensi	CKP	Efisiensi	Rata ² Satker
Sekretariat Jenderal	97,33	100	95,19	99,22	100	14,81	96,09

Tabel 3.21 Nilai SMART Sekretariat Jenderal sebagai Eselon I Tahun 2023

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap Perencanaan, Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran, dan Kepatuhan terhadap Regulasi. Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA yaitu untuk Kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung Manajemen Kas dan Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- Revisi DIPA, bobot 10%;
- Deviasi Halaman III DIPA, bobot 10%;
- Data Kontrak, bobot 10%;
- Penyelesaian Tagihan, bobot 10%;
- Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%;
- Dispensasi SPM, bobot 10%;
- Penyerapan Anggaran, bobot 20%;
- Capaian Output, bobot 25%

Nilai IKPA Sekretariat Jenderal pada Tahun 2023 adalah **95,36**

KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
					REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
139	013	404233	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	Nilai	100.00	72.77	95.36	91.00	100.00	99.27	100.00	100.00	95.36	100%	95.36
				Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
				Nilai Akhir	10.00	7.28	19.05	9.10	10.00	9.93	5.00	25.00			
				Nilai Aspek		86.39			97.11			100.00			

Gambar 3.1 Nilai IKPA Sekretariat Jenderal pada Tahun 2023

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. *E-performance* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi *e-performance* Kementerian Hukum dan HAM dapat diakses melalui laman <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Sekretariat Jenderal telah melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2023 secara berkala. Adapun capaian *e-performance* Sekretariat Jenderal Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN : 2023 SEKRETARIAT JENDERAL											
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		WAKTU PENYELESAIAN	TARGET				REALISASI	
			KELUAR	MASUK		JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN	
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Perencanaan Satuan Kerja yang Nilai AKRP minimal "BB"			34 Personel Triwulan IV	TRW1	0	0	0	Januari - Sosialisasi Kelembagaan Penyusunan LKIP	
						TRW2	94	persen	100	Februari - Telaahan LKIP Kantor Wilayah - Sosialisasi Evaluasi AKRP melalui aplikasi E-Performance	
						TRW3	0		0	Maret - Telaahan LKIP Kantor Wilayah - Sosialisasi Evaluasi AKRP melalui aplikasi E-Performance	
						TRW4	0		0	April - Evaluasi SARIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	
						TRW5	0		0	Mei - Berdasarkan surat Direktur Jenderal Nomor IT-PM/02/01-150 tanggal 30 Mei 2023 hal Penyempitan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilakukan pada 11 Unit Eselon I dan 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk dengan hasil sebagai berikut: 1. 1 Kantor Wilayah mendapatkan nilai "AA" 2. 9 Unit Eselon I dan 32 Kantor Wilayah mendapatkan nilai "A" 3. 2 Unit Eselon I mendapatkan nilai "BB"	
		Sasaran Kinerja Pegawai:			93 Personel Triwulan IV	TRW1	0		0	Juni - Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri SARIP Kantor Wilayah Tahun 2022	
						TRW2	0		0	Juli - Persiapan Evaluasi SARIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023	
						TRW3	0		0	Agustus - Persiapan Evaluasi SARIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023	
						TRW4	0		0	September - Persiapan Evaluasi SARIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023	
						TRW5	0		0	Oktober - Pemenuhan Data Dukungan Cakupan Kemajuan RB Evaluasi SARIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023	
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang Akuntabel	Perencanaan Satuan Kerja yang Nilai capaian RB minimal "B"			1 WTP Triwulan IV	TRW1	0		0	Januari - Sosialisasi Kelembagaan Penyusunan LKIP	
						TRW2	0		0	Februari - Telaahan LKIP Kantor Wilayah - Sosialisasi Evaluasi AKRP melalui aplikasi E-Performance	
						TRW3	0		0	Maret - Telaahan LKIP Kantor Wilayah - Sosialisasi Evaluasi AKRP melalui aplikasi E-Performance	
						TRW4	94	persen	93,18	April - Evaluasi SARIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	
						TRW5	0		0	Mei - Berdasarkan surat Direktur Jenderal Nomor IT-PM/02/01-150 tanggal 30 Mei 2023 hal Penyempitan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilakukan pada 11 Unit Eselon I dan 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk dengan hasil sebagai berikut: 1. 1 Kantor Wilayah mendapatkan nilai "AA" 2. 9 Unit Eselon I dan 32 Kantor Wilayah mendapatkan nilai "A" 3. 2 Unit Eselon I mendapatkan nilai "BB"	
		Sasaran Kinerja Pegawai:			1 WTP Triwulan IV	TRW1	0		0	Juni - Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri SARIP Kantor Wilayah Tahun 2022	
						TRW2	1	WTP	1	Juli - Persiapan Evaluasi SARIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023	
						TRW3	0		0	Agustus - Persiapan Evaluasi SARIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023	
						TRW4	0		0	September - Persiapan Evaluasi SARIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023	
						TRW5	0		0	Oktober - Pemenuhan Data Dukungan Cakupan Kemajuan RB Evaluasi SARIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023	

Gambar 3.2 Capaian *e-performance* Sekretariat Jenderal pada Tahun 2023

2. Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan capaian target kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring <https://kinerja.kemenkumham.go.id>. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, Sekretariat Jenderal memiliki 11 Target Kinerja. Adapun capaian Target Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	TARGET KINERJA	HASIL PENILAIAN													
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	TOTAL	%
1	Meningkatkan kualitas Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	200	100%
2	Meningkatnya Nilai Pengelolaan Arsip Dinamis (arsip aktif dan inaktif) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	-	-	95	-	-	100	-	-	100	-	-	100	395	98,75%
3	Pelaksanaan Sistem Merit di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	-	-	95	-	-	100	-	-	100	-	-	100	395	98,75%
4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kemenkumham 95	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	400	100%
5	Mendorong Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan BPK RI	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	100	300	100%
6	Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	-	300	100%
7	Peningkatan Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Hukum dan HAM	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	100	300	100%
8	Pelaksanaan Perencanaan BMN Kemenkumham secara tepat waktu dan akurat	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100	300	100%
9	Data BMN Kementerian Hukum dan HAM tercatat, tervalidasi dan akurat	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	200	100%
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100	300	100%
11	Terciptanya instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	200	100%
NILAI AKHIR														3.290	99,69%

Tabel 3.22 Capaian Target Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023

3. e-Monev BAPPENAS

Aplikasi *e-Monev* BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi *e-Monev* juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi *e-Monev* dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Adapun capaian *e-Monev* Sekretariat Jenderal Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.3 Capaian *e-Monev* Sekretariat Jenderal Tahun 2023

Berdasarkan aplikasi *e-Monev* BAPPENAS, *progress* pelaksanaan dan serapan anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2023 adalah sebesar **90,27%**. Adapun *progress* per Kategori Pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- Perencanaan : 6%
- Persiapan : 1%
- Pelaksanaan : 42%
- Selesai : 52%
- Kemanfaatan : 69,68%

4. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Eselon II

a. Biro Perencanaan

1) Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Status
Terwujudnya Organisasi Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang Efektif dan Efisien	Presentase Satuan Kerja yang Mengimplementasikan 8 Area Perubahan	95%	99,20%	104,42%	Sangat Baik

Tabel 3.23 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 Biro Perencanaan Tahun 2023

Pada tahun 2023, Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang telah mengunggah Data Dukung terkait RKT RB Tahun 2023 adalah sebanyak 874 Satuan Kerja dari total 881 Satuan Kerja Operasional. Realisasi terhadap terhadap Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jmlh Satker yg Mengunggah Daduk}}{\text{Jmlh Satker Operasional Kemenkumham}} \times 100\%$$

$$\frac{874 \text{ Satker}}{881 \text{ Satker}} \times 100\% = \mathbf{99,20\%}$$

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian IKK Ke - 1}$$

$$\frac{99,20\%}{95\%} \times 100\% = \mathbf{104,42\%}$$

2) Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Status
Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	Presentase Satuan Kerja yang Mendapatkan Nilai SMART di atas 95	100%	56,46%	56,46%	Kurang

Tabel 3.24 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 Biro Perencanaan Tahun 2023

Pada Tahun 2023, Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang telah mendapatkan nilai SMART di atas 95 sebanyak 660 dari total

1.169 entitas yang dilakukan penilaian SMART. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	SMART > 95	%
1	Unit Eselon I	10	90,91%
2	Program Setjen	26	74,28%
3	Program Ditjen Imigrasi	95	49,74%
4	Program Ditjen Pemasyarakatan	369	51,54%
5	Program Ditjen AHU	32	82,05%
6	Program Ditjen Kekayaan Intelektual	25	73,53%
7	Program Ditjen PP	24	70,59%
8	Program Ditjen HAM	23	67,65%
9	Program BPHN	24	70,59%
10	Program BSK Kumham	29	85,29%
11	Program BPSDM Kumham	3	50%
Total		660	56,46%

Tabel 3.25 Capaian Nilai SMART Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023

Realisasi terhadap terhadap Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai SMART} > 95}{\text{Jmlh Entitas yg Dilakukan Penilaian SMART}} \times 100\%$$

$$\frac{660}{1.169} \times 100\% = \mathbf{56,46\%}$$

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian IKK Ke - 2}$$

$$\frac{56,37\%}{100\%} \times 100\% = \mathbf{56,46\%}$$

Penyebab ketidakberhasilan Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 adalah sebagai berikut:

- Pada tahun 2023 terdapat perubahan dalam penginputan capaian *output*. Dimana pada tahun-tahun sebelumnya, pengisian capaian *output* dilakukan

melalui aplikasi SMART. Namun pada tahun 2023, penginputan capaian *output* dilakukan melalui aplikasi SAKTI. Sehingga operator yang biasa meng-*input* capaian *output* pun berubah. Yang sebelumnya di-*input* bagian Program Dan Pelaporan berubah di bagian Keuangan; dan

- b) Masih terdapat banyak Satuan Kerja pada Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasarakatan yang Nilai Kinerja Anggarannya masih di bawah 95.

b. Biro Sumber Daya Manusia

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Status
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat didalam UU ASN mulai dari <i>Recruitment</i> sampai dengan <i>Retirement</i>	95%	110,74%	116,57%	Sangat Baik

Tabel 3.25 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Biro Sumber Daya Manusia Tahun 2023

Berdasarkan Pasal 21 UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN, Hak-hak Pegawai meliputi :

- 1) Gaji, tunjangan dan fasilitas;
- 2) Cuti;
- 3) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- 4) Perlindungan; dan
- 5) Pengembangan Kompetensi.

Berdasarkan data SIMPEG, jumlah PNS Kementerian Hukum dan HAM (per tanggal 31 Desember 2023) adalah **63.845** orang. Sehingga untuk mencapai indikator Persentase Pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat didalam UU ASN mulai dari *Recruitment* sampai dengan *Retirement* diukur menggunakan 5 komponen hak PNS, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Gaji, tunjangan dan fasilitas

Seluruh pegawai telah memperoleh haknya atas gaji, tunjangan dan fasilitas. Sehingga realisasinya adalah **100%**.

- 2) Cuti

Pada Tahun 2023, terdapat pengajuan cuti sebanyak 315.161 dengan yang disetujui sebanyak 331.180 Sehingga realisasinya adalah

$$\frac{315.161}{331.180} \times 100\% = \mathbf{95,16\%}$$

3) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua

Pada Tahun 2023, terdapat pegawai yang pensiun sebanyak 1.358 orang dan semuanya telah memperoleh hak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sehingga realisasinya adalah **100%**.

4) Perlindungan

Seluruh pegawai sudah memiliki BPJS/KIS. Sehingga realisasinya adalah **100%**.

5) Pengembangan kompetensi

Pada Tahun 2023, jumlah pegawai yang sudah memperoleh pengembangan kompetensi adalah sebagai berikut:

- Jumlah pegawai yang memperoleh pelatihan struktural = 2.117 orang
- Jumlah pegawai yang memperoleh pelatihan teknis = 98.050 orang;
- Jumlah pegawai yang memperoleh pelatihan fungsional = 1.125 orang.

Total: 101.292

Sehingga realisasinya adalah

$$\frac{101.292}{63.833} \times 100\% = \mathbf{158,56\%}$$

Maka total realisasi Persentase Pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat didalam UU ASN mulai dari *Recruitment* sampai dengan *Retirement* adalah

$$\frac{(100\% + 95,16\% + 100\% + 100\% + 158,56\%)}{5} \times 100\%$$

$$\frac{553,72\%}{5} \times 100\% = \mathbf{110,74\%}$$

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$\frac{Realisai}{Target} \times 100\% = Capaian IKK$$

$$\frac{110,74\%}{95\%} \times 100\% = \mathbf{116,57\%}$$

c. Biro Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Status
Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Efektif dan Efisien	Persentase Satuan Kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93	100%	93,87%	93,87%	Baik

Tabel 3.26 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Biro Keuangan Tahun 2023

Pada tahun 2023, Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93 sebanyak 1.087 dari total 1.158 entitas yang dilakukan penilaian IKPA. Realisasi terhadap terhadap Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jmlh Satker nilai IKPA} > 93}{\text{Jmlh Satker}} \times 100\%$$

$$\frac{1.087}{1.158} \times 100\% = \mathbf{93,87\%}$$

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian IKK}$$

$$\frac{93,87\%}{100\%} \times 100\% = \mathbf{93,87\%}$$

d. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa

1) Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Status
Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung TUSI sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%	99,95%	99,95%	Baik

Tabel 3.27 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023

Dalam pencapaian indikator ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Persentase satuan kerja yang melakukan perencanaan BMN secara tepat waktu dan akurat.

Kebutuhan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tepat sasaran didukung oleh indikator Persentase satuan kerja yang melakukan perencanaan BMN secara tepat waktu dan akurat. Berdasarkan tabel perhitungan di atas diperoleh data capaian yaitu dari 1.159 satker yang ada pada Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 1.155 satker telah menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2024 sehingga diperoleh hasil capaian sebesar **99,70%**. Telah dilakukan penyusunan RKBMN tingkat Kementerian dan penyampaian RKBMN Tahun 2025 kepada DJKN Kementerian Keuangan pada tanggal 5 Desember 2023 (9 hari kerja lebih cepat dari *deadline* DJKN) dan Penelaahan Persetujuan dengan DJKN pada tanggal 3 Januari 2024.

- b) Persentase usulan penggunaan BMN yang ditindaklanjuti

Selama tahun 2023 dari 734 usulan penggunaan BMN, seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan penerbitan SK PSP. Sehingga diperoleh hasil capaian sebesar **100%**. Dalam mendukung capaian tersebut, dilakukan Kegiatan Penelitian dan Analisa Permohonan Penggunaan BMN (Persetujuan/Penolakan, Pengusulan dan Penetapan berupa PSP/Penggunaan Sementara).

- c) Prosentase usulan pemanfaatan BMN yang ditindaklanjuti

Selama tahun 2023 dari 295 persetujuan sewa BMN, seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan penerbitan SK Penetapan Pelaksanaan Sewa. Sehingga diperoleh hasil capaian sebesar **100%**. Dalam mendukung capaian tersebut, dilakukan Kegiatan Penelitian dan Analisa Permohonan Pemanfaatan BMN (Persetujuan/Penolakan, Pengusulan dan Penetapan Pemanfaatan berupa Sewa/Pinjam Pakai/BGS/BSG).

- d) Persentase jumlah permasalahan atas BMN Kemenkumham yang ditindaklanjuti

Terdapat 2 permasalahan terkait penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan BMN yang telah ditindaklanjuti. Sehingga diperoleh hasil capaian sebesar **100%**. Adapaun permasalahan beserta tindak lanjut yang telah dilakukan selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- (1) Inventarisasi dan Identifikasi Permasalahan Tanah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- (2) Penertiban Tanah Kemenkumham di Kota Tangerang

- e) Persentase satuan kerja yang data BMNnya tercatat, tervalidasi dan akurat

Kegiatan pencatatan dan pelaporan BMN yang tertib didukung Persentase satuan kerja yang data BMN-nya tercatat, tervalidasi dan akurat. Sebanyak 1.158 satker telah menyampaikan telaahan Pemutakhiran Data BMN dan Penyusunan CalBMN, dan sebanyak 1.158 data satker tersebut telah divalidasi sebagai dasar penyusunan Laporan BMN Kementerian Hukum dan HAM Tahunan Tahun 2023, sehingga diperoleh capaian sebesar **100%**.

- f) Persentase nilai BMN yang rusak berat/hilang yang ditindaklanjuti

Terdapat 594 usulan atas BMN yang rusak berat/ hilang dari satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dari 579 usulan tersebut seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan:

- (1) 110 SK Penghapusan Karena Penjualan;
- (2) 140 Izin Prinsip/Permohonan Penjualan ke Pengelola;
- (3) 344 Persetujuan/ perpanjangan persetujuan/ perubahan nilai limit penjualan.

Sehingga diperoleh capaian sebesar **100%**.

- g) Persentase penyelesaian BMN yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak dapat dipindahtangankan secara cepat dan akurat

Terdapat 144 usulan BMN yang tidak dapat dimanfaatkan dan/ atau dipindahtangankan dari satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dari 144 usulan tersebut seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan:

- (1) 47 SK Penghapusan Karena Sebab-Sebab Lain/ Alih Status;

- (2) 2 Izin Prinsip/ Permohonan Penghapusan ke Pengelola Barang;
 - (3) 51 Izin Prinsip/ Permohonan Penghapusan ke Pengelola Barang
 - (4) 6 Persetujuan Pemusnahan
 - (5) 38 Persetujuan Penghapusan
- Sehingga diperoleh hasil capaian sebesar **100%**.

Maka total realisasi Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung TUSI sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM adalah

$$\frac{(99,70\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\%)}{7} \times 100\%$$

$$\frac{699,70}{7} \times 100\% = \mathbf{99,95\%}$$

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian IKK Ke - 1}$$

$$\frac{99,95\%}{100\%} \times 100\% = \mathbf{99,95\%}$$

2) Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Status
Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Persentase menurunnya Nilai Temuan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	10%	0%	200%	Sangat Baik

Tabel 3.28 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2021 dan 2022 tidak terdapat temuan yang menimbulkan kerugian negara sehingga nilai temuan BMN untuk LHP Tahun 2021 dan 2022 adalah 0%. Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 adalah sebagai berikut:

$$\frac{(Target - (Realisasi - Target))}{Target} \times 100\% = \text{Capaian IKK Ke - 2}$$

$$\begin{aligned} & \frac{(10\% - (0\% - 10\%))}{10\%} \times 100\% \\ & \frac{(10\% - (-10\%))}{10\%} \times 100\% \\ & \frac{(10\% + 10\%)}{10\%} \times 100\% \\ & \frac{20\%}{10\%} \times 100\% = \mathbf{200\%} \end{aligned}$$

e. Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Status
Meningkatnya Citra Positif Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Opini Positif terhadap Pemberitaan Kementerian Hukum dan HAM di Media	90%	100%	111,11%	Sangat Baik

Tabel 3.29 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Tahun 2023

Dalam meningkatkan Citra Positif Kementerian Hukum dan HAM, Telah dilakukan beberapa kegiatan selama Tahun 2023, yakni:

- 1) Penyampaian Informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat luas melalui media internal (www.kemenkumham.go.id), menghasilkan 130 berita;
- 2) Informasi yang terpublikasi melalui akun resmi media sosial Kemenkumham dan Setjen, menghasilkan 918 konten;
- 3) Penyajian berita dan informasi melalui siaran pers yang didistribusikan ke media, menghasilkan 44 siaran pers;
- 4) Produksi audio visual sebanyak 5 video; dan
- 5) Penyelenggaraan advertorial dan media *campaign* sebanyak 17 media;

Realisasi dari Persentase Opini Positif terhadap Pemberitaan Kementerian Hukum dan HAM di Media adalah **100%**. Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \text{Capaian IKK} \\ & \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = \mathbf{111,11\%} \end{aligned}$$

f. Biro Umum

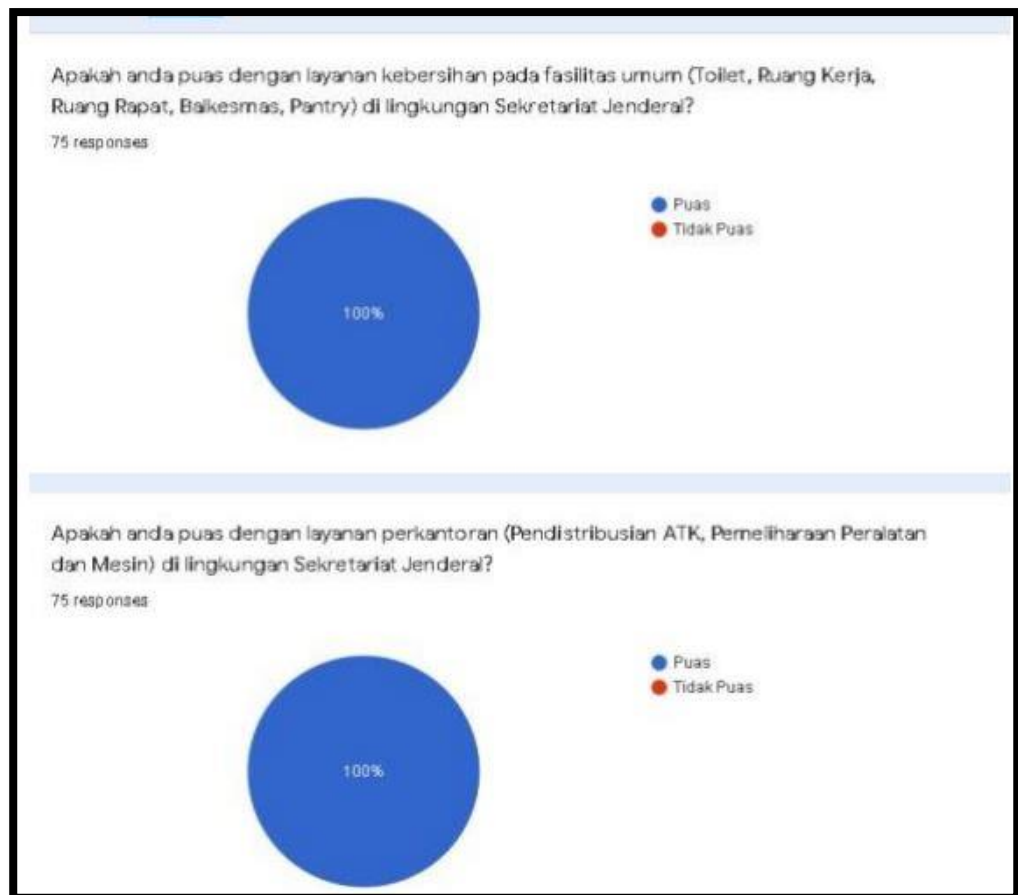
Biro Umum mendukung Capaian Sekretariat Jendral atas Sasaran Program ke-1 pada Indikator Kinerja Program 2, dengan penjelasan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Status
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Pegawai yang Puas atas Layanan Umum Internal Kesetjenan	95%	100%	105,26%	Sangat Baik

Tabel 3.30 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Biro Umum Tahun 2023

Biro Umum merumuskan Indeks Kepuasan Layanan Perkantoran melalui survei dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) Reponden:
 - a) Sekretaris Jenderal : Pejabat dan Pegawai
 - b) Unit Eselon I : Pengguna Layanan Balai Kesehatan Masyarakat Kementerian Hukum dan HAM dan Layanan Perkantoran
- 2) Sistem Survei secara *Real Time*
- 3) Kategori Layanan adalah Layanan Kesehatan dan Layanan Perkantoran



Gambar 3.4 Hasil Survei Kualitas Layanan Internal Kesekjenan Biro Umum pada Tahun 2023

Berdasarkan survei yang dilakukan dari 75 Responden menjawab Puas atas layanan umum internal kesekjenan pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan tingkat kepuasan **100%** atas pelayanan yang diberikan. Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian IKK}$$

$$\frac{100\%}{95\%} \times 100\% = \mathbf{105,26\%}$$

5. Prestasi

Pada Tahun 2023, Sekretariat Jenderal mendapatkan beberapa penghargaan antara lain:

- Terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95,77 (sangat baik), pada Anugerah Pengadaan 2023;

- b) Peringkat Utama Kategori Implementasi Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Terbaik, pada BKN Awards 2023;
- c) Peringkat 1 Kategori Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT, pada BKN Awards 2023;
- d) SPBE Award Terbaik Tahun 2023 Kategori Penerapan Layanan SPBE;
- e) Peringkat Pertama Kategori Sinergitas Pengadaan ASN dan Tata Kelola Sekolah Kedinasan yang Informatif Tahun 2023;
- f) Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI) Level 4 (*Dynamic*) dengan Indeks 3,63, sebelumnya 1,5. (Tk 1 *Foundation*, Tk 2 *Emerging*, Tk 3 *Establish*, Tk 4 *Dynamic*, Tk 5 *Optimized*);
- g) Opini WTP 14 Kali Berturut-Turut sejak 2009 dari Badan Pemeriksa Keuangan;
- h) Terbaik Ke 2 atas UKPBJ Proaktif tahun 2023;
- i) Peringkat 2 Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2022 Kategori Pagu Besar;
- j) Terbaik Ke-3 dalam Peringkat Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Mitra KPPN Jakarta V Tahun 2022 Kategori Pagu Besar;
- k) Peringkat 5 Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja, pada BKN Awards 2023; dan
- l) Anugerah Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Digitalisasi Pembayaran Semester I Tahun 2023 di kantor KPPN Jakarta V.

E. EFISIENSI SUMBER DAYA

1. Anggaran

Berbicara tentang efisiensi berarti mengukur keberhasilan suatu kegiatan berdasarkan besarnya biaya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bisa dikatakan bahwa semakin sedikit anggaran yang digunakan dalam mencapai hasil yang direncanakan maka semakin dapat dikatakan efisien. Tetapi dalam menentukan efisiensi harus menggunakan alat ukur yang sudah mempunyai formulasi perhitungan dalam berbagai aspek. Untuk pengukuran Nilai Efisiensi Anggaran terhadap Kinerja Unit Sekretariat Jenderal tahun 2023, digunakan data pada Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan.

Untuk mendapatkan nilai efisiensi Sekretariat Jenderal, maka pertama harus dilakukan pengukuran efisiensi *Output* Program tingkat Unit Eselon I dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

Keterangan	:
E_{OP}	: efisiensi <i>Output</i> Program tingkat unit eselon I
$AA \text{ Program}_i$	: alokasi anggaran program i
$RA \text{ Program}_i$	: realisasi anggaran program i
COP_i	: capaian <i>Output</i> Program i
n	: jumlah program pada suatu unit eselon I

Dari penghitungan dengan menggunakan rumus tersebut, Efisiensi Sekretariat Jenderal Tahun 2023 pada Aplikasi SMART DJA adalah **14,81%** (batas maksimal efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%). Setelah mendapatkan hasil efisiensi, dilakukan penghitungan Nilai Efisiensi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan	:
NE	: Nilai efisiensi
E	: Efisiensi

$$\begin{aligned} NE &= 50\% + \left(\frac{14,81\%}{20} \times 50 \right) \\ NE &= 50\% + 37,02\% \\ NE &= \mathbf{87,02\%} \end{aligned}$$

Sehingga Nilai Efisiensi Anggaran terhadap Kinerja Unit Sekretariat Jenderal Tahun 2023 adalah **87,02%**.

Pada Tahun 2023, anggaran Sekretariat Jenderal sebesar **Rp. 4.755.936.194.000,-** yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan 2 (dua) Sasaran Program dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Program. Adapun realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp. 4.518.893.442.720** atau **95,02%** dengan capaian Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- IKP-1, Presentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB" dengan capaian **106,38%**
- IKP-2, Presentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90 dengan capaian **99,13%**
- IKP-3, Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham dengan capaian **100%**

Sehingga berdasarkan capaian tersebut, telah dilakukan efisiensi anggaran yang digunakan dalam mencapai target yang direncanakan.

2. Sumber Daya Manusia

Dampak revolusi industri 4.0 dalam perubahan proses bisnis semakin dirasakan. Otomatisasi dan penyederhanaan proses bisnis diberlakukan pada skala yang lebih luas dan terus dioptimalkan. Hal ini berdampak pada potensi penurunan beban kerja yang berimbas pada optimalisasi dan efisiensi pegawai. Beberapa kebijakan yang dilakukan dalam rangka efisiensi SDM adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pemenuhan kebutuhan SDM dari internal melalui pengembangan karir dan kompetensi

Pengembangan SDM adalah upaya untuk mengembangkan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia melalui proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai suatu hasil optimal. Dengan dilakukannya pengembangan SDM, diharapkan terjadi peningkatan kinerja organisasi dengan memaksimalkan kinerja pegawai melalui efisiensi, efektivitas, produktivitas dan kualitas kerja. Adapun pengembangan SDM yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Kompetensi melalui Pelatihan, antara lain:

- a) Pelatihan Kepemimpinan

- (1) Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.I sebanyak 18 Pegawai;
- (2) Pelatihan Kepemimpinan Tk.II sebanyak 18 Pegawai;
- (3) Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 238 Pegawai;
- (4) Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebanyak 1.886 Pegawai.

- b) Pelatihan Teknis

- (1) Pelatihan The 13Th ASEAN Border Leadership Exchange (ABLE) Programme sebanyak 2 Pegawai;
- (2) *Massive Open Online Courses* (MOOC) Muatan Teknis Substansi Lembaga Tahun Anggaran 2023 sebanyak 20.703 Pegawai;
- (3) Pelatihan Mediasi sebanyak 10 Pegawai;
- (4) Pelatihan Pendidikan Khusus Profesi Advokat sebanyak 5 Pegawai;
- (5) Pelatihan PPT sebanyak 30 Pegawai;
- (6) Pelatihan *Public Speaking* 30 Pegawai;
- (7) Pelatihan MC sebanyak 90 Pegawai.

- 2) Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan, antara lain:

- a) Dalam Negeri:

- S2 sebanyak 16 Pegawai

- S3 sebanyak 2 Pegawai
- b) Luar Negeri:
 - S2 sebanyak 2 Pegawai

b. Pengendalian Pertumbuhan Pegawai

Penambahan pegawai khususnya untuk pegawai dengan masa kerja yang sangat lama seperti pegawai negeri sipil tidak lagi dapat dihitung berdasarkan beban kerja saat ini, melainkan memerlukan analisis beban kerja yang bersifat proyektif. Dalam pengelolaan ASN, dilakukan perencanaan pemenuhan kebutuhan SDM dihitung dengan mempertimbangkan antara lain kebijakan nasional terkait pengadaan ASN, sasaran kinerja dan prioritas program unggulan, restrukturisasi organisasi, kompetensi inti yang dibutuhkan organisasi, jumlah pegawai yang akan berhenti, pertimbangan komposisi SDM, ketersediaan calon pelamar di pasar tenaga kerja, serta jalur pemenuhan pegawai. Pada Tahun 2023, jumlah SDM Sekretariat Jenderal sebanyak 781 pegawai. Jika dibandingkan dengan jumlah SDM tahun sebelumnya sebesar 708 pegawai, maka terjadi penambahan jumlah SDM sebanyak 15 pegawai atau tumbuh positif sebesar **+10,31%**. Pertumbuhan pegawai ini masih pada batas wajar mengingat terjadi peningkatan kompleksitas organisasi dalam mendukung kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sebagai respon terhadap *e-government*, Sekretariat Jenderal telah melakukan serangkaian transformasi dalam rangka penerapan *e-government* dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan diantaranya:

- a. Aplikasi Sistem Surat Masuk dan Surat Keluar (Sisumaker) dalam rangka pengelolaan persuratan;
- b. Aplikasi e-RB dalam rangka Pelaksanaan Penilaian/Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal;
- c. Sistem Informasi Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- d. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dalam rangka mendukung integritas data, kemudahan pengaksesan, dan kemudahan pengelolaan sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan dan fungsi dalam bidang administrasi kepegawaian;

- e. Pendaftaran pelayanan kesehatan di Balikesmas secara *online* melalui link balkesmas.kemenkumham.go.id sehingga pegawai yang ingin mendapat pelayanan kesehatan dapat terkoordinasi satu pintu pelayanan;
- f. Aplikasi e-Rumga dalam rangka pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Jenderal untuk peminjaman ruang rapat, penggunaan Wisma Pengayoman, penggunaan Graha Pengayoman dan pelaporan *online* hemat energi Kantor Wilayah.

Adapun efisiensi yang dirasakan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi di Sekretariat Jenderal diantaranya:

- a. Menunjang budaya digital dalam rangka *e-government*;
- b. Menyederhanakan birokrasi dan mempercepat proses dan waktu penyelesaian tugas; dan
- c. Mendukung budaya *paperless* sehingga terdapat efisiensi sumber daya dan biaya pengantaran naskah dinas atau dokumen.

BAB IV PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Pencapaian kinerja Tahun 2023 merupakan wujud sinergi seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam menghadapi berbagai tantangan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh *stakeholders* dan mampu memberikan informasi yang relevan tentang kinerja Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan disusunnya laporan ini diharapkan juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM di tahun yang akan datang.

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal. Laporan Kinerja ini merefleksikan pelaksanaan Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal;
2. Dalam Perencanaan Kinerja, Sekretariat Jenderal telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan dalam Nomor SEK.1-PR.01.04-310 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang di dalamnya tertuang visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja dan kerangka pendanaan serta telah ditetapkan juga Perjanjian Kinerja tahun 2023;
3. Pada Tahun 2023, target dalam Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja sudah tercapai dengan baik meskipun masih terdapat target yang belum tercapai;
4. Pagu Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 4.755.936.194.000, terealisasi sebesar Rp. 4.518.893.442.720 atau 95,02%;
5. Capaian Nilai Kinerja Anggaran pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA Sekretariat Jenderal adalah ...;
 - b. Nilai IKPA Sekretariat Jenderal adalah
6. Dalam pelaksanaan kegiatan telah menerapkan prinsip akuntabel, efektif dan efisien atas pemanfaatan sumber daya.

B. SARAN

Upaya pemecahan masalah atau kendala yang dihadapi perlu dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan Sekretariat Jenderal

Kementerian Hukum dan HAM. Berikut beberapa saran untuk meningkatkan kinerja instansi kedepannya:

1. Memanfaatkan data yang disajikan dalam laporan kinerja dan hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan, maupun dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, perbaikan pengelolaan program dan kegiatan, serta peningkatan kinerja;
2. Tetap melakukan Sosialisasi, Internalisasi, Pendampingan, Penguatan Satuan Kerja dalam pelaksanaan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah untuk meningkatkan nilai IKPA;
4. Pelaksanaan kegiatan pembinaan penyusunan laporan keuangan, rekonsiliasi data laporan keuangan, dan monitoring evaluasi sistem akuntansi instansi berbasis akrual (SAIBA) dalam rangka pencapaian opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM;
5. Penguatan fungsi pembinaan dan koordinasi Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama ke semua lini Kemenkumham, mulai dari Unit Utama, Kantor Wilayah, sampai Unit Pelaksana Teknis;
6. Meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja, Kementerian Keuangan dan mitra kerja lainnya terkait Pelaksanaan Anggaran;
7. Perlu adanya peraturan tentang Pedoman Penatausahaan BMN dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
8. Pengelola BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM segera melakukan pembaharuan ketetapan terhadap penghuni yang seharusnya menempati rumah negara melalui Surat Keputusan dan melakukan penertiban terhadap penghuni yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan serta penghuni yang bukan pegawai.

LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SEKRETARIS JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pihak Pertama,
Sekretaris Jenderal

Yasonna H. Laoly

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS JENDERAL DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	87,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	92,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	94 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya organisasi lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang efektif dan efisien	1. Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan 8 area perubahan	95 %
2.	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia	1. Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement	95 %
3.	Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tugas sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100 %
		2. Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	10 %
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM	1. Persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekjenan	95 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM	1. Persentase opini positif terhadap pemberitaan Kementerian Hukum dan HAM di media	90 %
6.	Meningkatnya pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM	1. Indeks Domain Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,47 Indeks
		2. Indeks Domain Tata Kelola	3,14 Indeks
		3. Indeks Domain Layanan Surat Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,33 Indeks
7.	Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	1. Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai SMART diatas 95	100 %
8.	Mewujudkan tata Kelola keuangan yang efektif dan efisien	1. Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93	100 %
9.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

No.	Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen		Rp. 4.861.070.505.000,-
1.	Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 7.497.932.000,-
2.	Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 29.993.203.000,-
3.	Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 9.366.611.000,-
4.	Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja	Rp. 15.678.202.000,-
5.	Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 10.608.327.000,-
6.	Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 4.787.926.230.000,-
7.	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 596.233.416.000,-
8.	Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 40.052.090.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Yasonna H. Laoly	Pihak Pertama, Sekretaris Jenderal  Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.
--	--



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SEKRETARIS JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Sekretaris Jenderal



Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIRO PERENCANAAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ida Asep Somara
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal


Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Biro Perencanaan


Ida Asep Somara
NIP. 19710102 199403 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIRO PERENCANAAN DENGAN SEKRETARIS JENDERAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	87,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	92,0

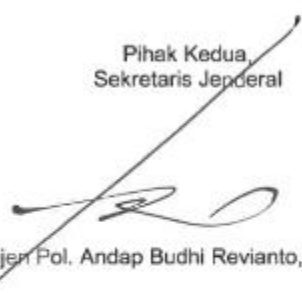
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	94 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya organisasi lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang efektif dan efisien	Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan 8 area perubahan	95 %
2	Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai SMART diatas 95	100 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 15,678,202,000,-
Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja	Rp. 15,678,202,000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal


Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Biro Perencanaan


Ida Asep Somara
NIP. 19710102 199403 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIRO PERENCANAAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ida Asep Somara
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Biro Perencanaan

Ida Asep Somara
NIP. 19710102 199403 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sudjonggo
Jabatan : Kepala Biro Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Biro Kepegawaian

Sudjonggo
NIP. 19631124 198811 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN DENGAN SEKRETARIS JENDERAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	87,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	92,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	94 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement	95 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 29,993,203,000,-
Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 29,993,203,000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Biro Kepegawaian

Sudjono
NIP. 19631124 198811 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sudjonggo
Jabatan : Kepala Biro Kepegawaian

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Biro Kepegawaian

Sudjonggo
NIP. 19631124 198311 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIRO KEUANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wisnu Nugroho Dewanto
Jabatan : Kepala Biro Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Biro Keuangan

Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 19680521 199903 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIRO KEUANGAN DENGAN SEKRETARIS JENDERAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	87,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	92,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	94 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan tata Kelola keuangan yang efektif dan efisien	Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93	100%

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 9,366,611,000,-
Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 9,366,611,000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal



Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Biro Keuangan



Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 19580521 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIRO KEUANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wisnu Nugroho Dewanto

Jabatan : Kepala Biro Keuangan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Biro Keuangan

Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 19680521 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novita Ilmaris
Jabatan : Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Biro Pengelolaan
Barang Milik Negara

Novita Ilmaris
NIP. 19761117 199903 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN
SEKRETARIS JENDERAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	87,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	92,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	94 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tugas sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100 %
		2. Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	10 %

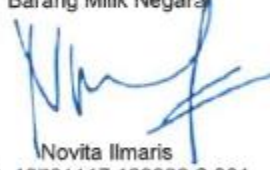
Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	
Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 10,608,327,000,- Rp. 10,608,327,000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal


Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Biro Pengelolaan
Barang Milik Negara


Novita Ilmaris
NIP. 19761117 199903 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novita Ilmaris
Jabatan : Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Biro Pengelolaan
Barang Milik Negara

Novita Ilmaris
NIP. 19761117 199903 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIRO HUMAS, HUKUM DAN KERJA SAMA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hantor Situmorang
Jabatan : Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal



Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama



Hantor Situmorang
NIP. 19670317 199203 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIRO HUMAS, HUKUM DAN KERJA SAMA DENGAN
SEKRETARIS JENDERAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	87,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	92,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	94 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM	Persentase opini positif terhadap pemberitaan Kementerian Hukum dan HAM di media	90%

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 7,497,932,000,-
Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 7,497,932,000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

Hantor Situmorang
NIP. 19670317 199203 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIRO HUMAS, HUKUM DAN KERJA SAMA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hantor Situmorang
Jabatan : Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

Hantor Situmorang
NIP. 19670317 199203 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIRO UMUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anak Agung Gde Krisna
Jabatan : Kepala Biro Umum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Biro Umum



Anak Agung Gde Krisna
NIP. 19800104 200012 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIRO UMUM DENGAN SEKRETARIS JENDERAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	87,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	92,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	94 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM	Persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekjenan	95 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4,787,926,230,000,-
Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 4,787,926,230,000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama
Kepala Biro Umum

Anak Agung Gde Krisna
NIP. 19800104 200012 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIRO UMUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anak Agung Gde Krisna
Jabatan : Kepala Biro Umum

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Biro Umum

Anak Agung Gde Krisna
NIP. 19800104 200012 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL
Gd. Sentra Mulia Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X6, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telp/Fax. 021-5252975, PO BOX 3489, SMS Gateway : 0817-000-3489
Laman: <http://itjen.kemenkumham.go.id>; email: itjen@kemenkumham.go.id

Nomor : ITJ-PW.03.01-159 30 Mei 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM Tahun 2023.

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
di -
Jakarta

1. Rujukan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
- d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.09.IT.01.01 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024;
- e. Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor: ITJ.1.KP.04.01-478 tanggal 07 Maret 2023 untuk melakukan Panel Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023;
- f. Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor: SEK.1-PR.04.05-253 Tanggal 31 Maret 2023 perihal Informasi Hasil Penilaian Mandiri (PM) Evaluasi AKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022.

2. Berdasarkan rujukan tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-08.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024, disebutkan bahwa:

- i. Tim Evaluator Inspektorat Jenderal melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian dan Unit Eselon I.
 - ii. Tim Penilai Mandiri yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM, terdiri dari perwakilan Unit Eselon I, bertugas melakukan *self-assessment* terhadap akuntabilitas kinerja kantor wilayah beserta satuan kerja / unit pelaksana teknis.
 - iii. Hasil *self-assessment* dari Tim Penilai Mandiri dan UKE I sebagai satuan Kerja diserahkan kepada APIP Inspektorat Jenderal untuk dilakukan evaluasi dan penilaian.
- b. Berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor: SEK.1-PR.04.05-253 Tanggal 31 Maret 2023 perihal Informasi Hasil Penilaian Mandiri (PM) Evaluasi AKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, dapat diketahui bahwa **hasil verifikasi Biro Perencanaan** atas Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP pada 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, dengan **nilai rata-rata tingkat kantor wilayah sebesar 87,31, atau dengan predikat A**, dengan rincian sebagaimana terlampir.
- c. Bahwa Inspektorat Jenderal telah melakukan panel evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum dan HAM terhadap 11 (sebelas) Unit Eselon I dan hasilnya nilai capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 **memperoleh rata-rata nilai sebesar 81,60 atau dengan predikat A**, dengan rincian sebagaimana terlampir. Atas perolehan nilai capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM tersebut, dapat diketahui bahwa:
- i. Nilai capaian kinerja rata-rata tersebut menginterpretasikan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah "Memuaskan", yaitu dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/Pengawas/Subkoordinator.
 - ii. Pelaksanaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Hukum dan HAM secara umum telah dilakukan dengan baik yaitu dengan menyusun dokumen perencanaan kinerja, perumusan indikator kinerja, penyusunan laporan kinerja, serta telah berupaya untuk melakukan evaluasi kinerja internal secara berkala.
 - iii. Terdapat beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:
 - a) Pelaksanaan pemenuhan aspek keberadaan, aspek kualitas, dan aspek pemanfaatan pada masing-masing komponen belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
 - b) Pelaksanaan teknis penilaian mandiri atas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang perlu dilaksanakan sampai dengan tingkat satuan kerja;
 - c) Perlu dilaksanakan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja oleh masing-masing Unit, sehingga terdapat perbaikan dan jaminan akuntabilitas kinerja secara berkesinambungan.
 - iv. Terhadap penilaian hasil evaluasi tersebut, diharapkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi dimaksud.

3. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 sebagai acuan dalam melakukan monitoring atas hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta menjadi bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



Inspektur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh
RAZILU
NIP.196511281991031002

Tembusan:

1. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Sertifikasi Elektronik Nasional.
Klik dokumen dapat diunduh melalui tautan <https://www.bse.go.id/verifikasi>

Lampiran I
Surat Inspektur Jenderal
Nomor : ITJ-PW.03.01-159
Tanggal : 30 Mei 2023

**HASIL VERIFIKASI BIRO PERENCANAAN
TERHADAP PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKIP KANTOR WILAYAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2022**

No.	Kantor Wilayah	Nilai	Predikat
1	DI. Yogyakarta	95	AA
2	Sulawesi Tengah	87,5	A
3	Sulawesi Selatan	87,5	A
4	Gorontalo	87,5	A
5	Jawa Tengah	87,5	A
6	Jawa Timur	87,5	A
7	DKI Jakarta	87,5	A
8	Bali	87,5	A
9	Nusa Tenggara Timur	87,5	A
10	Nusa Tenggara Barat	87,5	A
11	Aceh	87,5	A
12	Sumatera Selatan	87,5	A
13	Sumatera Barat	87,5	A
14	Bengkulu	87,5	A
15	Kepulauan Riau	87,5	A
16	Riau	87,5	A
17	Bangka Belitung	87,5	A
18	Jambi	87,5	A
19	Sulawesi Tenggara	87,5	A
20	Papua	87,5	A
21	Papua Barat	87,5	A

No.	Kantor Wilayah	Nilai	Predikat
22	Kalimantan Barat	87,5	A
23	Kalimantan Tengah	87,5	A
24	Kalimantan Selatan	87,5	A
25	Kalimantan Timur	87,5	A
26	Maluku	87,5	A
27	Maluku Utara	87,5	A
28	Sumatera Utara	86,9	A
29	Sulawesi Utara	86,6	A
30	Jawa Barat	86	A
31	Banten	86	A
32	Sulawesi Barat	83,3	A
33	Lampung	82,7	A
Nilai Rata - Rata		87,3	A

Lampiran II
Surat Inspektur Jenderal
Nomor : ITJ-PW.03.01-159
Tanggal : 30 Mei 2023

**NILAI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023
BERDASARKAN HASIL PANEL EVALUASI INSPEKTORAT JENDERAL**

No.	Unit Eselon I	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Internal	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat
	Bobot Minimal	30	30	15	25		
1	Setjen	25.50	25.50	11.25	20.00	82.25	A
2	Itjen	25.20	26.10	12.75	20.00	84.05	A
3	Ditjen AHU	26.10	24.60	12.30	20.00	83.00	A
4	Ditjen PAS	24.60	25.50	12.75	20.00	82.85	A
5	Ditjen Imigrasi	24,6	23.10	12.30	20.00	80.00	BB
6	Ditjen KI	25.50	27.00	12.30	20.00	84.80	A
7	Ditjen PP	26.10	24.60	11.70	20.00	82.40	A
8	Ditjen HAM	21.60	24.00	10.50	20.00	76.10	BB
9	Balitbangkumham	24.60	25.50	10.80	20.00	80.90	A
10	BPHN	23.10	24.60	12.45	20.00	80.15	A
11	BPSDM	24,60	24,60	12,00	20.00	81.20	A
Nilai akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian						81,60	A



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/01 / RB.06 / 2023
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Perubahan Evaluasi Reformasi
Birokrasi Tahun 2023 dan
Penyampaian Informasi Praktik
Baik Reformasi Birokrasi

18 Januari 2023

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian;
2. Sekretaris Kementerian;
3. Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
4. Sekretaris Utama/Sekretaris Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Asisten Perencanaan Umum Mabes TNI;
6. Asisten Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Polri;
7. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI;
8. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI;
9. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI;
10. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi;
11. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Menindaklanjuti arahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak kepada masyarakat serta pembangunan, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Fokus perubahan terhadap kedua peraturan tersebut adalah memastikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi memberikan dampak nyata sehingga

memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan dan atau prioritas Presiden RI lainnya.

Terkait hal tersebut, khususnya tentang evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, berikut disampaikan informasi tentang pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi tahun 2023:

1. Menghentikan kegiatan pengisian PMPRB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sampai pemberitahuan selanjutnya;
2. Mekanisme evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2023 akan dilakukan berdasarkan pada peraturan terbaru yang akan diterbitkan dan disosialisasikan dalam waktu dekat;
3. Setiap instansi pemerintah diharapkan tetap menindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pada periode sebelumnya sebagai upaya perbaikan berkelanjutan di masing-masing instansi;
4. Untuk mendapatkan gambaran perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan dan sebagai media pembelajaran reformasi birokrasi antar instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah agar menyampaikan informasi praktik baik pelaksanaan reformasi birokrasi di instansinya, berupa inovasi yang berdampak kepada masyarakat dan *stakeholders*;
5. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengisian informasi praktik baik pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana angka 4, adalah sebagai berikut:
 - a. Praktik baik yang disampaikan bisa lebih dari satu;
 - b. Proses pengisian data dapat dilakukan melalui tautan **bit.ly/PraktikBaikRB2023** dengan menjawab pertanyaan dan kriteria yang telah ditentukan (terlampir);
 - c. Batas waktu pengisian *form* pelaksanaan praktik baik adalah sampai dengan 31 Maret 2023.

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerja samanya
disampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan
Pengawasan,



[Signature]
Erwan Agus Purwanto

Tembusan Yth.:
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2022**

RINGKASAN EKSEKUTIF



**Nomor : 30.a/LHP/XV/05/2023
Tanggal : 24 Mei 2023**

Lampiran

Tabel Rincian Opini atas LKKL dan LKBUN

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	006	Kejaksaan RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	007	Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10.	013	Kementerian Hukum dan HAM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian ESDM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ⁽¹⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17.	024	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18.	025	Kementerian Agama	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19.	026	Kementerian Ketenagakerjaan	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
20.	027	Kementerian Sosial	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
21.	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	036	Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27.	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28.	041	Kementerian BUMN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29.	042	Badan Riset dan Inovasi Nasional ⁽¹⁾	WTP	WTP	WTP	WDP	⁽¹⁾
30.	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
31.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
32.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34.	051	Badan Siber dan Sandi Negara ⁽¹⁾	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
35.	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36.	054	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37.	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
38.	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

72 4w

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2018	2019	2020	2021	2022
		Nasional					
39.	057	Perpustakaan Nasional RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
41.	060	Kepolisian Negara RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
42.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
43.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
44.	065	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal ¹⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46.	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
48.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
49.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
50.	076	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
51.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
52.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WTP	WTP	WDP	¹⁾
54.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	¹⁾
55.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WTP	WTP	WTP	¹⁾
56.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	¹⁾
57.	083	Badan Informasi Geospasial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
58.	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
59.	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
60.	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
61.	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
62.	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63.	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
64.	090	Kementerian Perdagangan	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
65.	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
66.	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
67.	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
68.	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
69.	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70.	104	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ¹⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71.	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
72.	107	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	²⁾ WTP	WTP	WTP	WTP
73.	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
74.	109	Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WTP	WTP	WTP	WTP	¹⁾
75.	110	Ombudsman RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
76.	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
77.	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
78.	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

24/46

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2018	2019	2020	2021	2022
79.	114	Sekretariat Kabinet	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
80.	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
81.	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
82.	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
83.	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
84.	119	Badan Keamanan Laut	TMP	TMP	WTP	WTP	WTP
85.	120	Kementerian Koordinator bidang Kematriman	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
86.	121	Badan Ekonomi Kreatif	WTP	WTP	2)	3)	3)
87.	122	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	2)	WTP	WTP	WTP	WTP
88.	123	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	4)	4)	4)	WTP	WTP
89.	124	Badan Riset dan Inovasi Nasional	3)	3)	3)	2)	WTP
90.	999	Bendahara Umum Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Keterangan:

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

- 1) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2019
- 2) : Penambahan Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2019
- 3) : Kementerian/Lembaga di likuidasi di Tahun 2020
- 4) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2021
- 5) : Kementerian/Lembaga di likuidasi di Tahun 2021
- 6) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2021
- 7) : Kementerian/Lembaga di likuidasi di Tahun 2022
- 8) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2022

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

2022



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**JL. H. R. RASUNA SAID NO.KAV. 6, RT.16/RW.7, KUNINGAN, KOTA JAKARTA SELATAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 12940**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**SEMAKIN
PASTI**

**REFORMASI
HUKUM**



**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**

**SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**